

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III UNIT KEBUN LABUHAN HAJI**

LAPORAN

OLEH :

M. GHOZALI

168220005

AIDA NURJANNAH

168220046

MUHAMMAD FAUZI NASUTION

168220087



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III UNIT KEBUN LABUHAN HAJI**

LAPORAN

OLEH :

M. GHOZALI

168220005

AIDA NURJANNAH

168220046

MUHAMMAD FAUZI NASUTION

168220087



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III UNIT KEBUN LABUHAN HAJI

LAPORAN

OLEH :

M. GHOZALI	168220005
AIDA NURJANNAH	168220046
MUHAMMAD FAUZI NASUTION	168220087

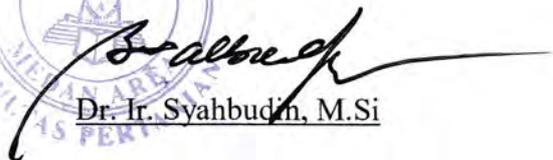
Laporan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk melengkapi komponen nilai
Praktek Kerja Lapangan di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area.

Mengetahui :

Dosen Pembimbing


Ir. Rizal Aziz, M.P

Dekan Fakultas Pertanian

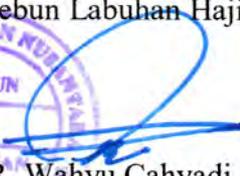

Dr. Ir. Syahbudin, M.Si

Pembimbing Lapangan


Hariaman

Manajer

Kebun Labuhan Haji ↓


R. Wahyu Cahyadi

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan karunianya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara III Unit Kebun Labuhan Haji di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun pembuatan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) sehingga Praktek Kerja Lapangan (PKL) wajib dilaksanakan pada setiap mahasiswa yang melanjutkan studi di Universitas Medan Area ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

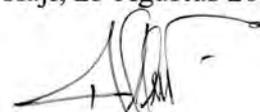
1. Dekan Fakultas Pertanian yaitu Bapak Ir. Syahbudin, M.Si yang telah besar hati memberi arahan serta masukan selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) berlangsung.
2. Manajer Unit Kebun Labuhan Haji yaitu Bapak R. Wahyu Cahyadi yang telah membantu dan mengarahkan dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
3. Asisten Kepala Kebun Labuhan Haji yaitu Bapak Hariaman yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, saran, serta bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelaraskan fakta yang ada di lapangan.

4. Dosen pembimbing Ir. Rizal Aziz yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, saran, serta bantuan kepada penulis sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara dalam menyusun laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan baik dan benar, serta dapat menyelesaikan Laporan tepat waktu.
5. Seluruh dosen Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, yang telah membantu penulis dalam menguasai materi. Sehingga penulis dapat menyetarakan materi yang didapat dalam perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
6. Seluruh rekan-rakan sesama mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, dan khususnya rekan-rekan satu kelas Agribisnis Stambuk 2016 yang telah membantu dan saling bekerjasama dalam menjalankan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Penulis menyadari bahwa Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini.

Akhir kata penulis berharap agar Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri khususnya.

Labuhan Haji, 23 Agustus 2019



Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Tujuan dan Manfaat	4
BAB II.....	5
SEJARAH PERKEBUNAN	5
2.1. Sejarah Perusahaan Perkebunan di Indonesia	5
2.1.1. Periode penjajahan Belanda.....	6
2.1.2. Periode Kependudukan Jepang.....	10
2.1.3. Masa Pemulihan Perkebunan.....	11
2.1.4. Periode Nasionalisasi Perusahaan Swasta Belanda dan Pemerintahan Orde Baru.....	12
2.1.5. Periode Reformasi dan Awal Pelaksanaan UU Perkebunan No. 18 Tahun 2004.....	14
2.2. Sejarah Perkembangan Kebun Labuhan Haji.....	16
2.2.1. Lokasi dan Luas Perusahaan Perkebunan Labuhan Haji	17
2.2.2. Iklim dan Topografi.....	18
2.2.3. Tujuan Perusahaan	19
BAB III	21
URAIAN KEGIATAN	21
3.1. Kegiatan Tatalaksana Perusahaan	21
3.1.1. Aspek Organisasi dan Manajemen Perusahaan.....	21
3.1.2. Aspek Keuangan.....	23
3.1.3. Aspek Sosial Budaya	24

3.1.4. Aspek Lingkungan	25
3.2. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).....	26
3.2.1. Pengenalan dan Survey Lokasi.....	26
3.2.2. Pengolahan Tanah di Lahan Tanaman Ulang (TU) Secara Mekanis.....	26
3.2.3. Pemancangan.....	30
3.2.4. Penanaman <i>Mucuna bracheteata</i>	32
3.2.5. Global Telling Pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	33
3.2.6. Pengendalian Gulma TBM Kelapa Sawit.....	37
3.2.7. Kastrasi Pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	38
3.2.8. Pengendalian Gulma Pada Tanaman Menghasilkan (TM).....	39
3.2.9. Analisa Daun.....	41
3.2.10. Perhitungan Bunga dan Buah (PBB).....	45
3.2.11. Angka Kerapatan Panen (AKP).....	48
3.2.12. Panen.....	50
3.2.13. Kap Inspeksi	53
3.2.14. Simulasi Pemadam Kebakaran	54
3.2.15. Sosialisai Penggunaan Alat Bor (Pocket) Untuk Lubang Pupuk Kelapa Sawit	56
3.2.16. Drone Areal.....	57
BAB IV.....	59
KESIMPULAN DAN SARAN	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Letak Geografis Kebun Labuhan Haji	17
Tabel 2. Kriteria Tingkat Serangan Hama Kelapa Sawit Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	35
Tabel 3. Komposisi Pohon Contoh Pada Analisa Daun	41
Tabel 4. Penentuan Pelepah Daun Untuk Dianalisa.....	42
Tabel 5. Analisa Percobaan Perhitungan Bunga dan Buah (PBB)	47
Tabel 6. Kriteria Kematangan Tandan Buah Segar (TBS)	49
Tabel 7. Peralatan Panen Yang digunakan Sesuai Umur Tanaman.....	50
Tabel 8. Kriteria KAP Inspeksi Tanaman Menghasilkan (TM)	52

DAFTAR GAMBAR

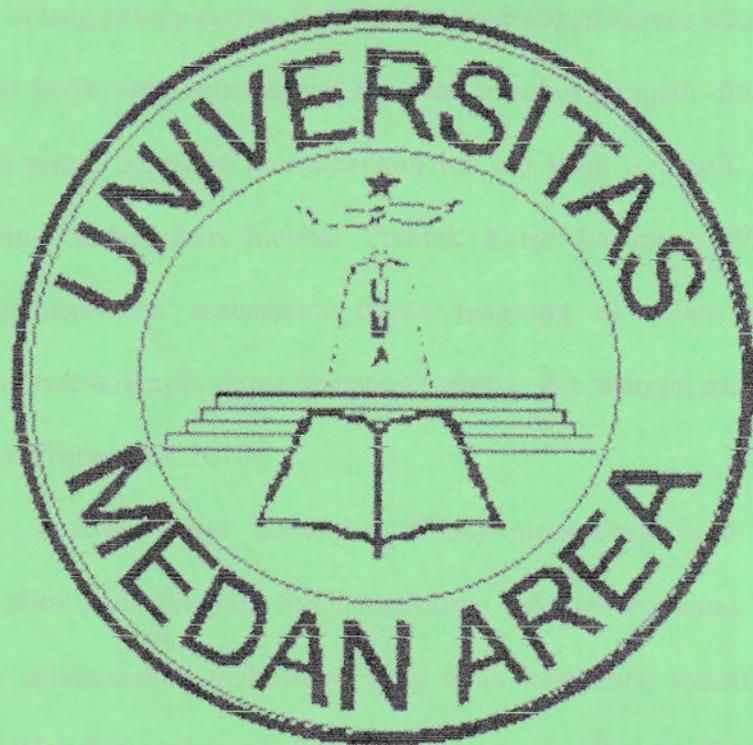
Gambar 1. Peta PTPN III Kebun Labuhan Haji.....	19
Gambar 2. Struktur Organisasi Kebun Labuhan Haji.....	22
Gambar 3. Arahan Manajer Kepada Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL)	26
Gambar 4. Pelaksanaan Luku I.....	27
Gambar 5. Pelaksanaan Pemancangan Rumpukan.....	28
Gambar 6. Pelaksanaan <i>Chipping</i>	29
Gambar 7. Pengolahan Tanah Dengan Merajang (<i>Harrowing</i>)	30
Gambar 8. Kegiatan Pemancangan.....	32
Gambar 9. Penanaman <i>Mucuna bracheteata</i>	33
Gambar 10. Unit Sampel (US) Pada <i>Global Telling</i> Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	35
Gambar 11. Simbol Pada <i>Global Telling</i>	36
Gambar 12. Pengendalian Gulma Pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).....	37
Gambar 13. Kegiatan Kastrasi	38
Gambar 14. Bunga Jantan, Bungan Betina dan Buah Dompot.....	39
Gambar 15. Pendongkelan Anak Kayu	40
Gambar 16. Pengendalian Gulma Dengan Cara Khemis Pada Tanaman Menghasilkan (TM).....	41
Gambar 17. Analisa Daun.....	45
Gambar 18. Perhitungan Bungan Buah (PBB).....	45
Gambar 19. Skema dan Pola Dalam Penentuan Baris Perhitungan Bunga Buah (PBB).....	46
Gambar 20. Pelaksanaan Perhitungan Angka Kerapatan Panen (AKP).	50
Gambar 21. Pelaksanaan Panen	52
Gambar 22. Penempatan Buah di TPH	53
Gambar 23. Sosialisasi Simulasi Pemadam Kebakaran.....	56
Gambar 24. Pemasangan <i>Drone</i>	58
Gambar 25. Penerbangan <i>Drone</i>	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Keseluruhan Kebun Labuhan Haji.....	62
Lampiran 2. Struktur Organisasi karpim Kebun Labuhan Haji	62
Lampiran 3. Jarak Tanam <i>Mucuna brachteata</i>	63
Lampiran 4. Pola Tanam <i>Mucuna brachteata</i>.....	64

1.1. Latar Belakang

Peraturan pemerintah tentang organisasi dan struktur perguruan tinggi telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 1968. Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki organisasi dan struktur yang jelas dan tegas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi, lulusan perguruan tinggi sangat sulit untuk mendapat pekerjaan, bahkan ada yang tidak mendapat pekerjaan. Bagi lulusan yang telah mendapatkan pekerjaan, terkadang sulit untuk menyesuaikan diri berkecimpung pada bidang pekerjaannya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman situasi kerja yang sebenarnya. Keadaan tersebut menjadi dasar suatu perguruan tinggi untuk berusaha menghasilkan lulusan yang terampil, pintar dan mampu bersaing, antara lain melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL). Program ini mengikutsertakan mahasiswa terjun langsung di dalam usaha, menjadikan mahasiswa terampil, dapat langsung bekerja, dan mampu menciptakan pekerjaan sendiri (Faber *dkk*, 2010).

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bagian dari kurikulum pada program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, dilaksanakan mahasiswa yang telah memenuhi syarat yaitu mata kuliah yang telah lulus sebanyak 110 SKS dan program Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan sebelum menyusun Tugas Akhir (Skripsi) sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Maka dari itu Praktek Kerja Lapangan (PKL) dimasukkan kedalam kurikulum mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area dan sebagai bahan pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja nantinya.

Salah satu peluang pekerjaan bagi mahasiswa lulusan Fakultas Pertanian kedepan diantaranya adalah disektor pertanian, Sektor ini banyak memberikan peluang pekerjaan yang luas. Menurut Kementerian Pertanian sektor pertanian masih merupakan sektor dengan pangsa penyerapan tenaga kerja terbesar, walaupun ada kecenderungan menurun. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2010 sekitar 38,69 juta tenaga kerja atau sekitar 35,76% dari total penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan menjadi 35,76 juta tenaga kerja atau 30,27%. Data penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tersebut hanya berasal dari kegiatan sektor pertanian primer, belum termasuk sektor sekunder dan tersier dari sistem dan usaha agroteknologi. Bila tenaga kerja dihitung dengan yang terserap pada sektor sekunder dan tersiernya, maka kemampuan sektor pertanian tentu akan lebih besar.

Sektor pertanian yang memiliki peluang besar dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor perkebunan. Hal ini didukung data dari Badan Pusat Statistik (2016) menyatakan bahwa luasan perkebunan di Indonesia dalam tahun 2012-2014 selalu meningkat yaitu: pada tahun 2012 seluas 26.015.52 Ha, tahun 2013 seluas 27.782 Ha, tahun 2014 seluas 29.344.48 Ha, dengan produksi minyak kelapa sawit pada tahun 2013-2014 yaitu pada tahun 2012 sebanyak 9.197,7 Ton, tahun 2013 sebanyak 10.010,7 Ton, dan tahun 2014 sebanyak 10.683,3 Ton. Kementerian pertanian (2015) menambahkan bahwa sektor perkebunan akan terus ditingkatkan dengan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Walaupun sektor pertanian khususnya sektor perkebunan dalam penyerapan tenaga kerja nasional sangat besar, namun di sisi

lain Kementerian Pertanian (2015) justru menjadi beban bagi sektor pertanian dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya.

Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi arus globalisasi khususnya di bidang perkebunan maka mahasiswa mutlak harus mampu memiliki kapasitas yang berkualitas dibidang perkebunan. Oleh karena itu, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dipandang sebagai wahana untuk menghasilkan sumber daya tersebut. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran diri setiap mahasiswa Fakultas Pertanian serius dalam menambah pengetahuan di dunia kerja pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan keinginan Kementerian Pertanian (2015) pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

1.2. Ruang Lingkup.

Perkebunan Labuhan Haji merupakan salah satu unit perkebunan PT. Perkebunan Nusantara III. Komoditi perkebunan yang diusahakan adalah kelapa sawit dan karet yang dapat dikatakan sudah cukup besar dan diakui dunia.

Ruang lingkup yang dipelajari pada Praktek Kerja Lapangan meliputi : Gambaran umum perusahaan, yaitu mencakup sejarah, lokasi, luasan perkebunan, iklim, topografi, dan jenis tanah. Organisasi dan manajemen, mencakup struktur organisasi, dan manajemen perusahaan, bidang/seksi kerja, sistem gaji upah. Aspek lingkungan mencakup limbah bekas bahan kimia dan cara penanganannya, serta kegiatan dilapangan.

SEJARAH UNIVERSITAS

1.1. Sejarah Pendidikan Perkebunan di Indonesia

Pendidikan Perkebunan telah mengalami perkembangan yang pesat sejak awal abad ke-20 yang saat ini terus berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui peningkatan produktivitas perkebunan.

Salah satu lembaga pendidikan perkebunan yang pertama kali didirikan adalah Universitas Medan Area (UMA) pada tahun 1962.

Sebelumnya, pendidikan perkebunan di Indonesia masih dilakukan secara informal dan terbatas pada keterampilan teknis.

Perkembangan pendidikan perkebunan di Indonesia terus berlanjut dengan adanya berbagai institusi pendidikan perkebunan yang didirikan.

Salah satu lembaga pendidikan perkebunan yang pertama kali didirikan secara resmi adalah Universitas Medan Area (UMA) pada tahun 1962.

Sebelumnya, pendidikan perkebunan di Indonesia masih dilakukan secara informal dan terbatas pada keterampilan teknis.

Perkembangan pendidikan perkebunan di Indonesia terus berlanjut dengan adanya berbagai institusi pendidikan perkebunan yang didirikan.

BAB II

SEJARAH PERKEBUNAN

2.1. Sejarah Perusahaan Perkebunan di Indonesia

Perkebunan Indonesia telah melewati perjalanan sejarah yang panjang. Lebih dari lima abad yang lalu, lautan nusantara telah ramai oleh lalu lintas perdagangan komoditi utama produk perkebunan, seperti lada, pala, cengkeh, dan rempah-rempah yang kemudian berkembang dengan berbagai komoditi tambahan, seperti kopi, kakao, karet, dan kelapa sawit yang telah menjadi produk utama dalam perekonomian nasional (Pahan, 2006).

Pada awalnya, perkebunan komersial yang sistem perekonomian pertanian komersial yang bercorak kolonial. Sistem perkebunan ini dibawah oleh perusahaan kapitalis asing yang sebenarnya merupakan sistem perkebunan Eropa (*European plantation*). Sistem perkebunan Eropa sangat berbeda dengan sistem perkebunan rakyat (*Garden system*) yang bersifat tradisional dan diusahakan dalam skala kecil dengan penyertaan modal yang seadanya. Perkebunan (*Plantation*) merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian tanaman komersial dalam skala besar dan kompleks yang bersifat padat modal (*Capital intensive*), menggunakan lahan yang luas, memiliki organisasi tenaga kerja yang rinci, menggunakan teknologi modern, spesialisasi, serta administrasi dan birokrasi (Pahan, 2006).

Menurut (Pahan, 2006) sejarah perkebunan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 5 priode, dimana perkembangan pengusahaannya memiliki dasar hukum yang berbeda-beda sesuai dengann situasi dan kondisi pada masa tersebut. Pengelompokan tersebut sebagai berikut :

1. Periode penjajahan Belanda (1600-1941).
2. Periode pendudukan Jepang (1942-1945).
3. Periode revolusi fisik beberapa tahun setelah Indonesia Merdeka dan pemulihan perkebunan (1945-1955).
4. Periode pengalihan/nasionalisasi perkebunan dari swasta asing ke PNP/PTP dan perkembangan pada periode orde baru (1956-1990-an).
5. Periode pembangunan perkebunan 2000-2004 dan awal pelaksanaan UU Perkebunan No.18 tahun 2004.

2.1.1. Periode penjajahan Belanda

Sistem kebun Indonesia pada mulanya merupakan sistem usaha pertanian tradisional yang telah ada sebelum masuknya VOC (*Verengdee Oost Indische Compagnie*) pada tahun 1600. Pada masa tersebut, sistem usaha kebun rakyat menjadi sumber eksploitasi komoditi perdagangan untuk pasaran Eropa. Sistem penyerahan paksa yang dipakai VOC untuk mengeksploitasi komoditi ekspor tersebut bahkan diteruskan sampai awal abad ke -19, sekalipun pemerintah jajahan telah berganti dari VOC ke tangan pemerintah Hindia Belanda semenjak tahun 1880-an (Pahan 2006).

Proses perubahan sistem usaha kebun (tradisional) ke perusahaan perkebunan (komersial) di Indonesia pada saat itu merupakan perubahan teknologi dan organisasi proses produksi yang berkaitan erat dengan perubahan kebijaksanaan politik kolonial dan sistem kapitalisme kolonial yang menjadi latar belakangnya. Secara umum, pertumbuhan sistem perkebunan pada masa kolonial

yang mengalami 2 fase perkembangan, yaitu industri perkebunan Negara yang kemudian beralih ke industri perkebunan swasta (Pahan, 2006).

Sistem tanaman paksa (*cultur stelsel 1830-1870*) merupakan bentuk perwujudan industri perkebunan negara yang merupakan kelanjutan dari politik eksploitasi (*drainage politiek*) VOC. Apabila pada zaman VOC eksploitasi dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui kepala pemerintahan feodal setempat maka tindakan secara langsung menggunakan sistem perkebunan negara. Pelaksanaan sistem eksploitasi baru ini dilaksanakan dengan alat birokrasi pemerintah yang berfungsi langsung sebagai pelaksanaan dalam proses mobilisasi sumber daya perekonomian agraris tanah jajahan, yaitu penguasaan terhadap tanah dan tenaga kerja (Pahan, 2006).

Perubahan kebijaksanaan politik kolonial pada tahun 1870-an terjadi setelah beralihnya kebijaksanaan politik konservasi menjadi kebijaksanaan politik konservatif menjadi kebijaksanaan politik liberal, yaitu dengan dikeluarkannya *Agrarische Wet* atau Undang-undang Agraria. Implikasinya, politik eksploitasi yang semula dikelola oleh perusahaan Negara diganti dengan perusahaan swasta. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya gelombang pembukaan industri perkebunan yang dilakukan oleh para pengusaha Eropa di tanah Jajahan (Pahan 2006).

Politik “pintu terbuka” sebenarnya terpaksa dilakukan oleh pemerintah Belanda karena adanya desakan dari golongan menengah yang menghendaki tempat dalam proses eksploitasi tanah jajahan. Golongan menengah ini kebanyakan merupakan pengusaha dan pemilik modal yang menjadi golongan *bourgeois* dan mendukung aliran liberalisme. Dengan demikian, mereka

menghendaki perubahan politik kolonial yang dapat mengikutsertakan mereka dalam proses eksploitasi tanah jajahan. Kaum *borjouis* muncul sebagai akibat proses industrialisasi di negeri Belanda pada pertengahan abad ke-19, dimana kaum kapitalisme lama (feodal) telah menikmati keuntungan dari tanah jajahan. Oleh karena itu, tujuan perjuangan politik mereka sebenarnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengeruk keuntungan dari tanah jajahan. Cara yang mereka tempuh dengan mendesak pemerintah untuk membuka tanah jajahan bagi penanaman modal mereka dibidang perkebunan (Pahan, 2006).

Perubahan ke arah politik terbuka tersebut membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus meninggalkan praktik-praktik eksploitasi dengan sistem paksaan ke prinsip perdagangan bebas yang terkait dengan sistem pajak dan penanaman modal. Dengan demikian, kaum kapitalis financial (*financial capitalism*) telah menggantikan peranan kapitalis kolonial dalam eksploitasi tanah jajahan. Pada dasawarsa 1870-an tersebut, telah terjadi proses komersialisasi secara luas di Hindia Belanda (Pahan, 2006).

Dengan berlakunya UU Agraria 1870 yang menjamin hak *erpact* yang memungkinkan penguasaan lahan dengan luas maksimal 350 ha (1.500 bahu) selama 75 tahun, para *planter* perseorangan yang telah berpengalaman dengan teknik produksi tanaman pada masa *cultur stesel* segera memanfaatkan peluang bisnis tersebut(Pahan, 2006).

Sejalan dengan meluasnya pasaran komoditi perkebeunan dunia dan krisis-krisis ekonomi yang menyebabkan merosotnya harga komoditi perkebunan pada tahun 1877-1878 dan 1883-1884 serta berjangkitnya epidemik penyakit *sereh* pada tebu (1885) dan penyakit-penyakit kopi arabika (1889), timbul desakan

untuk melakukan konsolidasi dan mengganti perusahaan perseorangan dengan perusahaan besar berbentuk NV (*Namlose Vennotschap*) yang secara kolektif bernaung dibawah *culturbank* atau *unie*. Untuk memimpin perusahaan tersebut diperlukan manajer yang memiliki keahlian memimpin perusahaan modern dalam konteks kapitalisme modern. Masa-masa tersebut merupakan periode berkembang pesatnya perkebunan di Hindia Belanda. Iklim perkembangan tersebut semakin subur sejalan dengan membaiknya pasaran komoditi perkebunan sejak dihapuskannya peraturan ekspor-impor yang menghambat perdagangan komoditi pada konvensi Brussel tahun 1903 (Pahan, 2006).

Sebagai akibat proses komersialisasi, tanah jajahan menjadi sumber komoditi ekspor dan sumber akumulasi modal. Akumulasi modal dari tanah jajahan menyebabkan proses industrialisasi di Belanda berkembang pesat dan menuntut penciptaan pasar di tanah jajahan, yaitu pasaran untuk produk industri dan modal. Lahirnya kapitalisme industri (*industrial capitalism*) pada akhir abad ke-19 di Belanda berpengaruh besar dalam menentukan kebijakan politik kolonial tanah jajahan sehingga menuntut intensifikasi sistem administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan yang mendasari timbulnya politik etis. Motif perubahan politik ini pada hakekatnya tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya, yaitu pelestarian kepentingan kaum kapitalis industri di tanah jajahan, termasuk kepentingan mereka dalam bidang industri perkebunan (Pahan, 2006).

Perkebunan rakyat pribumi juga berkembang dengan pesat pada periode 1849-1939. Pada masa itu, nilai hasil produksinya berlipat 10 kali, sedangkan perkebunan Barat berlipat 2 kali. Sepanjang perkembangan perkebunan pada abad

ke-20, keikutsertaan rakyat dalam mengusahakan perkebunan mulai tampak, bahkan di beberapa daerah ada kecenderungan bahwa rakyat semakin mementingkan komoditi perkebunan (Pahan, 2006).

2.1.2. Periode Kependudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, ekonomi perkebunan dapat dikatakan berhenti karena terjadi penurunan produksi perkebunan yang drastis. Hal ini disebabkan kebijaksanaan pemerintah Jepang dalam meningkatkan produksi pangan untuk kepentingan ekonomi perang dengan melakukan pembongkaran tanaman perkebunan dan menggantikannya dengan tanaman pangan (Pahan, 2006).

Awalnya, pembongkaran tanah perkebunan dilakukan pada lahan yang paling mudah diubah menjadi lahan tanaman pangan, yaitu perkebunan tembakau (di Langkat, dan Deli Serdang), serta tebu (di Jawa). Namun, perambahan kebun akhirnya meluas ke perkebunan besar (*onderneming*) tanaman keras. Kerusakan yang paling parah terjadi pada tanaman teh dengan kehilangan tidak kurang dari 1/3 lahannya, kehilangan karet sebanyak 12% dari luas lahan semula, dan kehilangan kelapa sawit sebanyak 16% dari luas lahan semula. Secara totalitas, produksi perkebunan pada zaman Jepang merosot sampai 80% dari periode sebelumnya (Pahan, 2006).

Penduduk Jepang telah menggoreskan tinta hitam dalam lembaran sejarah perkebunan Indonesia. Keadaan tersebut menjadi semakin parah karena pada konsolidasi pemerintah Republik Indonesia setelah terusirnya Jepang, tanah-tanah perkebunan diokupasi (diduduki) oleh penduduk setempat dan menggantinya dengan tanaman pangan (Pahan, 2006).

2.1.3. Masa Pemulihan Perkebunan

Berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak momentum perjuangan bangsa. Penyelenggaraan pemerintahan pada waktu itu masih melakukan konsolidasi terhadap masalah territorial dan ancaman (agresi) dari luar negeri. Selama periode 1945-1949, tidak ada kestabilan politik, baik di pusat maupun daerah. Krisis kabinet di pusat yang terjadi terus menerus dan timbulnya gerakan separatis antipusat di daerah menyebabkan pembangunan dan perkembangan ekonomi menjadi terkendala dan merosot (Pahan, 2006).

Berdasarkan ketentuan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 di Den Haag, perkebunan swasta asing yang masih berjalan akan di kembalikan kepada pemiliknya. Pemerintah Indonesia akan mengambil alih perkebunan Negara milik pemerintah kolonial Belanda dan perkebunan milik swasta yang tidak akan diusahakan kembali oleh pemiliknya. Program pemulihan perkebunan mulai di lancarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1951. Sejak saat itu beberapa perusahaan di pulau Jawa maupun di luar Jawa sudah mulai beroperasi kembali. Pada tahun 1952, 98% dari perkebunan karet, 88% dari perkebunan kelapa sawit, dan 80% dari perkebunan serat sudah beroperasi kembali. Usaha pemulihan perkebunan itu didasarkan pada beberapa faktor sebagai berikut:

1. Besarnya kerusakan yang diderita oleh suatu perkebunan, terutama modal dan alat-alat pengolahannya.
2. Jumlah modal yang diperlukan (tersedia) untuk mengoperasikannya jika kerusakan dinilai sangat berat.
3. Luas lahan perkebunan yang telah dipergunakan oleh penduduk setempat untuk menanam tanaman pangan.

4. Jumlah ganti rugi yang dituntut oleh badan atau organisasi yang menyelenggarakan pengelolaan.
5. Aktivitas pencuri/ perampok lokal yang dapat mengganggu penyelenggaraan perkebunan.
6. Luas lahan yang diduduki oleh rakyat secara liar (*wild occupation*).

2.1.4. Periode Nasionalisasi Perusahaan Swasta Belanda dan Pemerintahan Orde Baru

Nasionalisasi perusahaan perkebunan milik Swasta Belanda dipicu oleh tuntutan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda tentang kedaulatan Irian Barat (sekarang Papua). Sejak gagalnya pemerintah Indonesia memperoleh dukungan untuk kedaulatan rakyat Indonesia di Irian Barat pada pemungutan suara di PBB pada tanggal 29 November 1957, timbul gelombang pemogokan buruh yang bekerja di perusahaan perkebunan Belanda. Pemogokan ini disusul dengan tindakan pengambil alihan perusahaan dan perkebunan-perkebunan Belanda oleh para buruh (Pahan, 2006).

Menghadapi kondisi ini, pada tanggal 9 Desember 1957 Perdana Menteri/Menteri Pertahanan Djuanda Kartawidjaja selaku pimpinan tertinggi militer mengeluarkan suatu peraturan yang menempatkan seluruh perkebunan Belanda dibawah yuridiski Republik Indonesia dan memberikan wewenang pada Menteri Pertanian mengeluarkan peraturan tentang penempatan perkebunan Belanda dibawah pengawasan teknis sebuah organisasi baru yang bernama Pusat Perkebunan Nusantara (PPN) dan merupakan embrio dari Jawatan Perkebunan (Pahan, 2006).

Menurut Menteri Pertanian Sadjarwo, pengambil alihan oleh militer terhadap lebih dari 500 perkebunan Belanda atau sekitarnya 75% dari seluruh perkebunan yang ada di Indonesia dimaksudkan untuk melindungi pabrik dan instalasi perkebunan lainnya sehingga selama masa agitasi politik ini produksi tidak terhenti. Perkebunan-perkebunan tersebut menurut skenarionya akan dikembalikan pada pemliknya segera setelah Belanda setuju mengembalikan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Tekanan ekonomi yang diancarkan pemerintah Indonesia untuk mendesak Belanda mengembalikan Irian Barat belum menunjukkan hasil yang diharapkan sehingga pada bulan November 1958, Kabinet mengajukan Rencana Undang-Undang (RUU) Nasionalisasi. RUU tersebut ditanda tangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 Desember 1958 dan di undangkan sebagai UU nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia (Pahan, 2006).

Setelah periode pengambil alihan perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda pada tahun 1957-1958 yang kemudian dikeola sendiri oleh pemerintah, terlihat adanya kecenderungan penurunan produksi. Hal ini disebabkan transisi dalam pengelolaan dan belum siapnya sumberdaya manusia untuk menduduki posisi yang ditinggalkan oleh pekerja asing di perusahaan tersebut. Namun, secara perlahan dan pasti hal tersebut dapat diatasi sehingga produksi perkebunan dapat di tingkatkan lagi (Pahan, 2006).

Dalam periode selanjutnya, perkebunan mengalami perkembangan yang semakin baik, di mana sektor pertanian merupakan kerangka dasar dalam Pelita I yang dicanangkan oleh pemerintah Orda Baru sejak tahun 1969. Campur tangan pemerintah terhadap pengembangan perkebunan sejak orde baru menunjukkan

perhatian yang serius. Pemerintah selalu mengarahkan perkembangan perusahaan perkebunan dengan berbagai kebijaksanaan yang bertujuan agar pola pengembangannya sesuai dengan arah pembangunan nasional (Pahan, 2006).

Pola pengembangan yang telah dilaksanakan/ditetapkan pemerintah sejak orde baru antara lain :

1. Sejak tahun 1967, perusahaan perkebunan kelapa sawit dikelola oleh dua kelompok perusahaan, yaitu Perusahaan Besar Swasta Perkebunan (PNP) dan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN).
2. Pola Perkebunan inti rakyat (PIR) dalam bentuk NES/PIR-Bun pada 1977/1978, yaitu PIR-Lokal, PIR-Khusus, PIR-Berbantuan, PIR-Khusus.
3. Sejak 16 Desember 1978-3 Juni 1991, Pemerintah ikut campur tangan dalam pemasaran komoditas kelapa sawit.

2.1.5. Periode Reformasi dan Awal Pelaksanaan UU Perkebunan No. 18 Tahun 2004

Kegiatan pembangun tahun 2000-2004 berada pada era reformasi pembangunan di segala bidang yang menyebabkan terjadinya perubahan paradigma manajemen pembangunan nasional sesuai dengan UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Perubahan paradigma ini secara nyata menggeser inisiatif dari dominasi pemerintah keintensif masyarakat, dari pendekatan sektoral ke pendekatan jejaring kerja, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari sistem komando menjadi sistem pasar bebas, dari ketergantungan ke saling membutuhkan, dari pendekatan produksi menjadi pendekatan produktivitas. Visi pembangunan perkebunan yaitu mewujudkan

masyarakat sejahtera. Khususnya petani melalui sistem dan usaha perkebunan yang efektif, efisien, berdaya saing, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai visi perkebunan Indonesia tersebut maka misi pengembangan perkebunan harus dicapai melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mendorong berkembangnya usaha-usaha perkebunan dari berbagai tingkatan skala baik *on farm* maupun *off farm*.
2. Optimasi pemanfaatan sumber daya lahan dan sumberdaya manusia melalui penerapan usaha pokok tanaman perkebunan dan berbagai cabang usaha taninya.
3. Mengembangkan sistem pelayanan pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan.
4. Mendorong dan mengembangkan upaya penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi.
5. Mendorong dan mengembangkan upaya pemanfaatan potensi sumberdaya produksi tanaman perkebunan secara optimal dan berkesinambungan.
6. Mengupayakan ketersediaan berbagai kemudahan baik modal, masukan pertanian, teknologi benih unggul, dan pemasaran hasil.
7. Mendorong dan mengembangkan peran aktif petani pekebun dalam setiap proses produksi.

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi yaitu meningkatkan produktivitas usaha tani perkebunan secara keseluruhan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perkebunan (Pahan, 2006).

Dengan telah diundangkannya UU Perkebunan No. 18/2004 maka peta perjalanan perkebunan di Indonesia akan mengalami perubahan yang mendasar

karena tantangan dan peluang di sektor perkebunan akan semakin bertambah sejalan dengan masuknya perkebunan di kancah globalisasi (Pahan, 2006).

2.2. Sejarah Perkembangan Kebun Labuhan Haji

Kebun Labuhan Haji adalah salah satu unit kebun yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara III (persero). Kebun ini berasal dari Perkebunan Milik Maastkappay Hindia Belanda dibawah naungan NV. CMK (Cultur Maastkappay Kualuh) yang pada tahun 1958 di nasionalisasi sesuai undang-undang nomor 85 tahun 1958 menjadi PPN Baru Cabang Sumatera. Perkebunan ini telah beberapa kali mengalami restrukturisasi yaitu pada tahun 1961 menjadi PPN SUMUT IV, selanjutnya pada tahun 1963 diubah menjadi Unit Kebun PT. Perkebunan III (Persero).

Kemudian pada bulan April Tahun 1994 terjadi penggabungan antara PTP III, IV dan V menjadi satu perusahaan yang diberi nama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkantor pusat di Jalan Sei Batang Hari Nomor 2 Medan, dimana Kebun Labuhan Haji menjadi salah satu unitnya. Pada tahun 1998 s/d 2003 Kebun Labuhan Haji menjadi bagian dari Kebun Membang Muda. Kemudian dihitung mulai 1 April 2003 sampai saat ini Kebun Labuhan Haji berdiri sendiri kembali sesuai dengan SKPTS Direksi No. III/SKPTS/R301/2003.

Kebun Labuhan Haji termasuk di dalam wilayah kerja Distrik Labuhanbatu Utara III (DLAB-III), memiliki areal konsesi HGU seluas 3.103,13 Ha. Kebun Labuhan Haji memiliki 2 (dua) jenis komoditi yaitu tanaman kelapa sawit dan karet, dengan luasan Budidaya Tanaman Karet sebesar 1.179.90 Ha (Tanaman Menghasilkan 1.176.90 Ha dan Kebun Entrys 3 Ha) sedangkan untuk Budidaya Tanaman Kelapa Sawit sebesar 1.923.23 Ha (Tanaman Menghasilkan 1.745.50

Ha, Tanaman Belum Menghasilkan 146.57 Ha, dan Rencana Tanaman Ulang 31.16 Ha)

2.2.1. Lokasi dan Luas Perusahaan Perkebunan Labuhan Haji

Kebun Labuhan Haji terletak di Desa Labuhan Haji, Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara, yaitu \pm 250 Km dari Kota Medan. Kebun Labuhan Haji termasuk di dalam wilayah kerja Distrik Labuhan Batu III (DLAB-III), memiliki areal konsesi HGU seluas 3.248,07 Ha yang terdiri dari 5 Afdeling.

Kebun Labuhan Haji berbatasan dengan Desa Tanjung Pasir disebelah Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Pasir dan Sialang Taji, pada sebelah Timur berbatasan dengan Desa Silang Taji, serta berbatasan dengan Kebun Membang Muda disebelah Barat.

Tabel 1. Letak Geografis Kebun Labuhan Haji

URAIAN	IDENTITAS
Kabupaten	Labuhanbatu Utara
Kecamatan	Kualuh Hulu
Jarak	\pm 12 km dari Aek Kanopan (Ibu Kota Kabupaten), \pm 250 km dari Kota Medan
Ketinggian	39 Meter dari permukaan laut
Topografi	Datar
Jenis Tanah	Tanah Liat Berpasir Sampai Liat
pH Tanah	4-5
Letak Kebun	99° 42' 20' Bujur Timur 02° 32' 10' Lintang Utara

Sumber. PTPN III Kebun Labuhan Haji

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Kebun Labuhan Haji berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) memiliki luas keseluruhan Tanaman Kebun Labuhan Haji adalah sebesar 3,103.13 Ha. Dengan pembagian luas untuk masing-masing tanaman karet (1,179.90 Ha) dan tanaman kelapa sawit (1,923.23 Ha).

2.2.2. Iklim dan Topografi

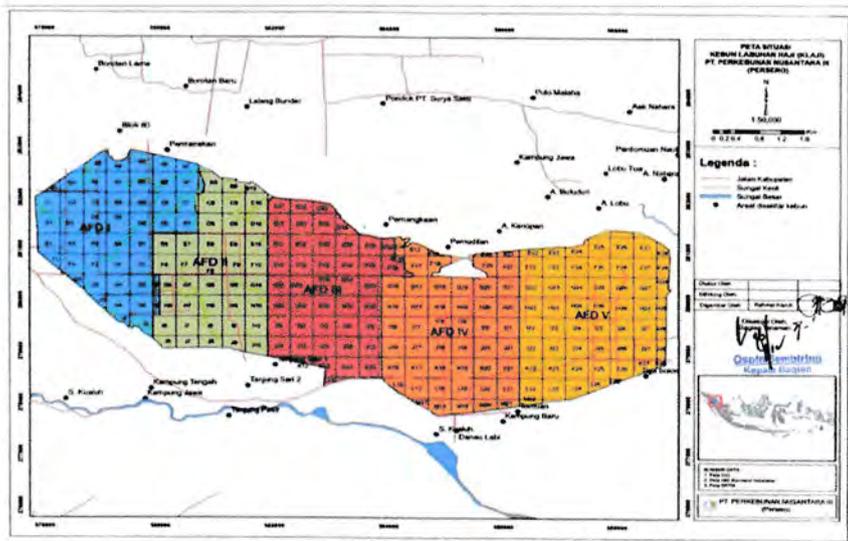
1. Iklim

Tanaman kelapa sawit dan tanaman karet adalah tanaman tropis. Daerah penanaman di Indonesia pulau Sumatera, Jawa Kalimantan, terletak pada zona antara 6° LU dan 6°LS (Ariansyah, 2014). Curah hujan tanaman Kelapa sawit berkisar 2.000-3.500 mm/tahun yang merata sepanjang tahun dengan minimal 100 mm/bulan, Suhu rata-rata tahunan untuk pertumbuhan dan produksi sawit berkisar antara 24-29°C, dengan produksi terbaik antara 25-27°C, dengan ketinggian tempat 25-400 dpl (Syakir, 2010). Pada tanaman karet curah hujan untuk pertumbuhan tanaman karet tidak kurang dari 2500 mm/tahun, optimal antara 2500-4000 mm/tahun, ketinggian tempat untuk pertumbuhan tanaman karet adalah 0-600 m dpl dan optimal pada ketinggian 200 m dpl, suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman karet adalah 20-35°C (Ariansyah, 2014).

Berdasarkan data yang diberikan oleh unit usaha kebun Labuhan Haji, kebun Labuhan Haji memiliki iklim dan curah hujan adalah sekitar 1200-2700 mm/tahun walaupun dengan kondisi alam yang saat ini tidak menentu dimana kecepatan angin yang tidak terlalu kencang, kelembaban sekitar 70% dan suhu di daerah perkebunan labuhan haji antara 29-31°C.

2. Topografi

Topografi perkebunan labuhan haji adalah termasuk dataran yang hampir tergolong gelombang dan dibagian tanahnya rata hampir pada keseluruhan areal Kebun. Areal Perkebunan Labuhan Haji 39 meter diatas permukaan laut (Ariansyah, 2014).



Gambar 1. Peta PTPN III Kebun Labuhan Haji
Sumber. PTPN III Unit Labuhan Haji

2.2.3. Tujuan Perusahaan

PTPN III (Persero) memiliki tujuan yang dituangkan dalam visi dan misi perusahaan. Visi dan misi tersebut antara lain terlampir dibawah ini :

1. Visi

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki visi “Menjadi Perusahaan Agribisnis Kelas Dunia Dengan Kinerja Prima dan Melaksanakan Tata Kelola Bisnis Terbaik”.

2. Misi

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki beberapa misi perusahaan, yaitu :

1. Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan.
2. Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan.
3. Memberlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya secara optimal.
4. Menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik bagi investor.

5. Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis.
Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas.
6. Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.

BAB III

URAIAN KEGIATAN

3.1. Kegiatan Tatalaksana Perusahaan

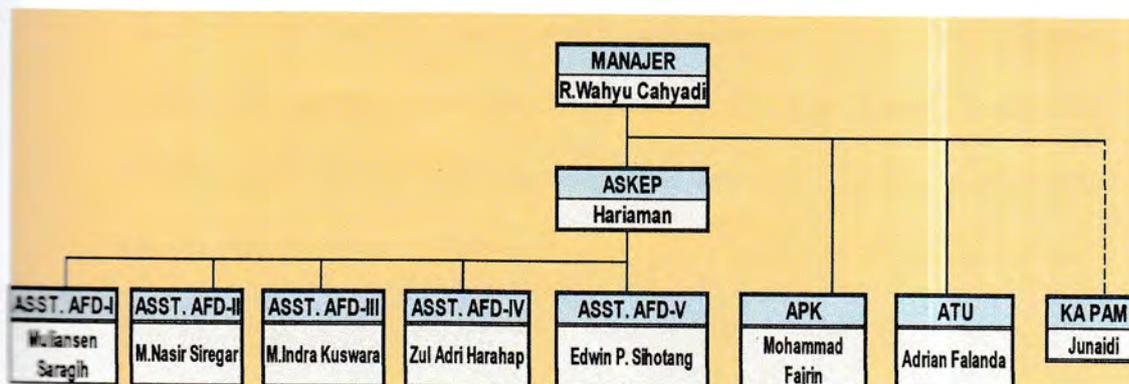
3.1.1. Aspek Organisasi dan Manajemen Perusahaan

Di dalam sebuah perkebunan pengorganisasian sangat perlu dilakukan agar perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian tempat penyatuan atau pengelompokan orang-orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai sama atau tujuan yang telah dirumuskan (Ariansyah, 2014).

Organisasi dan manajemen yang baik memberikan kesinambungan pada tugas dan pendelegasian kekuasaan kesatuan perintah, tanggung jawab, perintah dan wewenang. Hal ini akan memberikan efek positif dalam kebun terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Dalam suatu kebun harus mempunyai manajemen yang baik, berupa *planning, organizing, actuating, controlling* dan *evaluation*. Karena jika kelima fungsi tersebut dilaksanakan maka pengelolaan kebun akan bekerja dengan baik.

Struktur organisasi yang digunakan pada unit usaha Labuhan Haji sendiri terdiri dari 2 kelompok yaitu kelompok garis dan staff. Kelompok garis adalah orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas dalam organisasi yang berhak mengeluarkan perintah dan mengambil keputusan. Sedangkan kelompok staff adalah kelompok orang-orang yang pekerjaannya membentuk kelompok garis yang merupakan orang-orang ahli pada bidang masing-masing, struktur organisasi.

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi dan nama-nama yang terdapat pada struktur organisasi Kebun Labuhan Haji dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Kebun Labuhan Haji Tahun 2019

Adapun nama-nama Karyawan Pimpinan Kebun Labuhan Haji adalah sebagai berikut:

1. Manajer : R. Wahyu Cahyadi
2. Asst. Kepala : Hariaman
3. Asst. Afd I : Muliansen Saragih, SP
4. Asst. Afd II : Muhammad Indra Kuswara, SP
5. Asst. Afd III : Muhammad Nasir Siregar
6. Asst. Afd IV : Edwin Parluhutan Sihotang, SP
7. Asst. Afd V : Zul Adhri Harahap, SP
8. Asst. Tata Usaha : Adrian Falanda, SE
9. Asst. Personalia : Mohammad Fajrin, SH
10. Ka. Pam : Peltu, Junaidi

3.1.2. Aspek Keuangan

a. Daftar/Rekap Lembur A.U- 20, dan Insentif

Daftar/Rekap Lembur dan Insentif kehadiran di kirim dari bahagian masing- masing, kemudian dikutip sesuai lembur dan insentif yang telah *diberikan oleh Asisten yang bersangkutan dan telah ditanda tangani lalu, dikutip dan di Input ke dalam Payroll gaji sesuai dari bahagian masing- masing yang mendapat lembur dan insentif, untuk di jadikan gaji. Dikirimkan sesuai tanggal yang ada di dalam Memo Manager Unit.*

b. Daftar Rekap Jenis Premi

Daftar Premi dikirim dari bahagian yang mendapat premi ke Kantor Tata Usaha. Kemudian di kutip dan diinput ke Payroll Gaji sesuai premi yang diberikan, yang telah di tanda tangani oleh Asisten dari bagian. Pengutipan premi sesuai dengan premi yang telah diberikan oleh bagian yang mendapat premi. Dikirimkan sesuai tanggal yang ada di dalam *Memo Manager Unit.*

c. Jenis – Jenis Tunjangan

Tunjangan ada beberapa jenis yakni :

1. Tunjangan Jabatan
2. Tunjangan Listrik dan Air
3. Tunjangan Khusus
4. Tunjangan Cuti Tahunan/Panjang
5. Tunjangan bantuan Sepeda Motor Mandor – I Afdeling
6. Bantuan Anak Sekolah (BAS)

Untuk pembayaran segala jenis Tunjangan Karyawan sudah terprogram didalam Payroll Gaji.

d. Jurnal Upah

Setelah Daftar Gaji/Upah karyawan diprint-out, dilakukan Penjurnalan. Jurnal Upah adalah sebagai tempat berkumpulnya segala jenis macam pembayaran gaji karyawan pelaksana seperti :

- 1) Gaji Pokok Karyawan
- 2) Tunjangan Khusus Karyawan
- 3) Tunjangan Cuti Tahunan Karyawan
- 4) Bantuan Anak Sekolah / Pemandokan
- 5) Tunjangan PPH 21 Karyawan
- 6) Tunjangan Nilai Catu Beras Karyawan
- 7) Lembur dan Insentif Karyawan
- 8) Jenis macam premi seperti : Premi Mandor satu (1), Mandor Panen, Krani-1, dan Produksi Premi Pemeliharaan.

3.1.3. Aspek Sosial Budaya

Keberadaan Kebun Labuhan Haji tentu memberikan dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat sekitar di sepanjang intraksi kedua pihak yang sudah berlangsung cukup lama. Adanya kesempatan kerja (baik sebagai karyawan tetap maupun karyawan harian lepas (BHL) dan peluang berusaha yang tersedia dari kegiatan operasional kebun adalah salah satu dampak positif yang di peroleh warga sekitar baik sebagai karyawan tetap maupun buruh harian lepas (BHL).

Dampak positif lainnya adalah infrastruktur jalan kebun yang dapat dimanfaatkan warga untuk meningkatkan aksesibilitas mereka dukungan modal usaha melalui program PKBL, serta bantuan sarana dan prasarana pendidikan dan rumah ibadah.

3.1.4. Aspek Lingkungan

Salah satu aspek lingkungan yang dibahas adalah mengenai limbah. Limbah merupakan buangan atau sisa yang di hasilkan dari suatu proses atau kegiatan dari industri maupun kegiatan produksi lapangan. Limbah yang dihasilkan oleh perkebunan unit usaha Labuhan Haji adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Seperti bekas goni pemupukan, limbah ban alat transportasi, limbah minyak, jeregen bekas pestisida, limbah kertas maupun limbah yang lainnya. Adapun limbah- limbah yang di hasilkan pada proses peningkatan produksi kelapa sawit dalam penangannya yaitu:

1. Penanganan limbah padat bekas bahan kimia.
 - a. Sediakan bak tempat cucian di kantor afdeling dengan ukuran sesuai kebutuhan.
 - b. Setelah bahan kimia tanaman habis digunakan, tempat bahan kimia yang terbuat dari plastik atau kaleng dibawa ke kantor afdeling dan dicuci (mangkok dan ember pupuk). Karung pupuk sebelum digulung dikibaskan dipiringan pokok.
 - c. Bekas tempat kimia yang sudah bersih lalu dikirim dan dicatat sesuai dengan pemantauan dan pengangkutan limbah (B3).
2. Penanganan limbah padat seperti ban bekas alat transportasi, minyak oli kendaraan, limbah kertas administrasi, maupun limbah-limbah lainnya.

3.2. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

3.2.1. Pengenalan dan Survey Lokasi

Dalam pengenalan diri Manajer menerangkan apa-apa saja yang akan dilaksanakan selama melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan aturan-aturan yang ada di kebun Labuhan Haji. Pengenalan ini dilakukan di Kantor Besar Kebun Labuhan Haji. Hal yang dilakukan peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) mengenalkan diri sekaligus menyampaikan hal-hal apa yang dibutuhkan oleh peserta melalui Ringkasan Kegiatan yang tertera di jurnal harian peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL).



Gambar 3. Arahan Manajer Kepada Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL)

3.2.2. Pengolahan Tanah di Lahan Tanaman Ulang (TU) Secara Mekanis

Tanaman ulang atau (TU) adalah tanaman yang diremajakan dengan jenis tanaman yang sama karena secara ekonomis tidak lagi menguntungkan. Persiapan lahan tanaman ulang (TU) dapat dilakukan secara mekanis dan khemis. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh topografi lahan tersebut. Pada lahan yang memiliki karakter topografi yang rendah harus dilakukan pengolahan lahan tanaman ulang (TU) secara khemis. Dan pada lahan yang memiliki karakter dengan topografi

datar atau rata dilakukan pengolahan lahan tanaman ulang (TU) secara mekanis seperti yang dilakukan di lahan tanaman ulang (TU) Afd V Kebun Labuhan Haji.

Pengolahan lahan tanaman ulang (TU) secara mekanis meliputi tahap Luku I, Memancang rumpukan, Menumbang dan merumpuk pohon, mencacah (*chipping*), Luku II, dan rajang (*harrow*). Pada saat observasi dilakukan, persiapan lahan TU Afd V Kebun Labuhan Haji sudah memasuki ke tahap rajang (*harrow*). Berikut tahapan pelaksanaan tanaman ulang (TU), yaitu :

1. Luku I

Persiapan meluku I dilaksanakan sebelum menumbang pohon. Luku I dilaksanakan dengan cara membalik tanah dengan kedalaman minimal 30 cm dengan arah diagonal terhadap barisan tanaman (arah barat daya- timur laut). Jenis alat pertanian yang digunakan adalah *disc plough* dengan diameter piringan 25 inci (62,5 cm) yang ditarik oleh traktor roda ban.



Gambar 4. Pelaksanaan Luku I

2. Memancang Rumpukan

Kegiatan memancang rumpukan dilakukan sebelum penumbangan pohon dilakukan. Memancang rumpukan dilaksanakan oleh tenaga juru ukur. Arah pancang rumpukan sejajar dengan barisan tanaman dan diletakkan pada gawangan mati. Pemancangan dibuat tiap dua baris pohon yang ditumbang dirumpuk menjadi satu barisan rumpukan. Jarak rumpukan dengan rencana baris pokok jangan terlalu dekat minimal 2 meter.



Gambar 5. Pelaksanaan Pemancangan Rumpukan

3. Menumbang Pohon

Pekerjaan menumbang pohon dilaksanakan setelah pekerjaan memancang rumpukan. Penumbangan dilakukan dengan menggunakan alat berat *excavator*. Penumbangan harus diusahakan sampai ke pangkal pohon ikut terbongkar. Jika mengalami kesulitan dalam penumbangan dapat dilakukan pengorekan sebagian tanah disekeliling pangkal batang.

4. Mencacah (*Chipping*) dan Merumpuk Pohon

Pelaksanaan pekerjaan mencacah (*chipping*) dilaksanakan setelah pekerjaan penumbangan pohon. Seluruh bagian pohon (batang, pelepah, bonggol akar) dicacah dengan tebal cacahan maksimal 10 cm dan kemudian hasil cacahan dirumpuk dan ditempatkan pada titik pancang rumpukan yang telah tersedia. Bagian cacahan yang berada di parit dan jalan ditempatkan pada rumpukan sehingga tidak menghambat aliran air dan jalan. Lebar rumpukan pohon tidak boleh lebih dari 3 meter.



Gambar 6. Pelaksanaan *Chipping*

5. Luku II

Pekerjaan luku II dilaksanakan setelah kegiatan luku I, penumbangan pohon, mencacah (*chipping*), dan merumpuk pohon. Meluku II dilaksanakan dengan cara membalik tanah dengan kedalaman minimal 30 cm searah dengan rumpukan tanaman (arah utara- selatan). Meluku II dilakukan bertujuan untuk memperbaiki infiltrasi dan mengurangi laju *run-off* dengan cara pengolahan tanah (membalikkan tanah) , akar dan benda- benda yang ada didalam tanah terangkat ke permukaan sehingga tidak menjadi sumber hama bagi TU. Jenis alat pertanian yang

digunakan adalah *disc plough* dengan diameter piringan 25 inci (62,5 cm) yang ditarik oleh traktor roda ban.

6. Rajang (Harrow)

Pekerjaan merajang (*harrowing*) bertujuan untuk meratakan tanah yang dilaksanakan \pm 14 hari setelah pekerjaan luku II. Pekerjaan rajang dilaksanakan dengan alat pertanian *harrow* yang ditarik dengan traktor ban. Kedalaman rajang minimal 15 cm dan dilaksanakan searah dengan luku II (Utara-Selatan).



Gambar 7. Merajang Tanah (*Harrowing*)

3.2.3. Pemancangan

Pemancangan merupakan cara untuk mendapatkan letak dan barisan tanaman yang teratur sehingga diperlukan pemancangan diareal tersebut. Pemancangan dilakukan setelah selesai pembukaan lahan.

Pemancangan dibuat untuk memberi tanda baris tanaman dan titik lubang tanam. Jarak tanam yang dipakai pada tanaman ulang (TU) Afdeling V Kebun Labuhan Haji yaitu model segitiga sama sisi (metode mata lima). Pemancangan yang telah dilaksanakan yang telah sesuai pada posisi titik pancang tidak dibenarkan dicabut sebelum pelaksanaan penanaman. Pemancangan yang dilakukan dibagi atas

dua pancang yaitu pancang kepala dan pancang isi. Pемancangan dapat menggunakan bambu atau kayu yang ujungnya terdapat plastik berwarna sebagai penanda pembeda antara pancang hektaran, pancang kepala dengan pancang isi. Alat dalam melaksanakan pемancangan adalah Theodolit (teropong), kawat (seling), bambu pancang, plastik warna dan tojok (besi penahan seling).

Adapun Tim pемancang sebanyak 6 orang, 1 orang selaku sebagai peneropong, 2 orang sebagai penarik seling, 1 orang pемancang, 1 orang sebagai pembawa bambu.

Jarak tanam merupakan segitiga sama sisi dan disesuaikan dengan topografi. Jarak tanam 7,692 m x 9,090 m dengan kerapatan pohon 143 pohon per hektar dengan titik tanam harus lurus dan merupakan mata lima. Setelah itu tentukan patok hektaran (100 m x 100 m) hasil pemetaan sebagai titik pusat. Adapun langkah-langkah dalam pемancangan kepala yaitu sebagai berikut :

1. Pемancangan hektaran, yaitu dilakukan untuk mengetahui luasan blok dalam hitungan hektar. Pancang hektaran dilakukan dengan jarak 100 x 100 meter, bertujuan untuk memudahkan melakukan pемancangan kepala.
2. Setelah pancang hektaran selesai, selanjutnya dilakukan pемancangan kepala yang bertujuan untuk mengetahui jarak barisan tanaman dengan jarak 7,692 meter.
3. Setelah pancang kepala dilakukan, selanjutnya tahapan akhir yaitu pancang isi atau disebut pancang lubang tanam. Pancang isi dilakukan dengan jarak tanam 9,090 meter.
4. Tinggi pancang isi sekurang-kurangnya satu meter di atas tanah, oleh karena itu diperlukan pancang yang lurus dengan panjang 1,25 meter.



Gambar 8. Kegiatan Pemancangan

3.2.4. Penanaman *Mucuna bracheteata*

Penanaman *Mucuna bracheteata* dilakukan setelah pengolahan tanah selesai. Kebutuhan bibit yang dibutuhkan sebanyak 660 sampai dengan 715 bibit/ha. Pola tanam penanaman *Mucuna bracheteata* ditanam 6 baris setiap gawangan, 2 baris diantara titik tanam dan 4 garis di kanan-kiri barisan tanaman. Pola tanam *Mucuna bracheteata* dapat dilihat pada lampiran 4 dan jarak tanam dijelaskan pada lampiran 5. Cara penanaman *Mucuna bracheteata* yaitu dibuat lubang tanam dengan ukuran 20x20x20 cm, lalu membuka plastik *polybag* dan kemudian masukkan *Mucuna bracheteata* ke dalam lubang yang telah dibuat dan ditutup lagi dengan tanah. Pemeliharaan *Mucuna bracheteata* yaitu dilakukan pemupukan satu bulan setelah penanaman dengan NPK 15.15.6.4 dengan dosis 10 gr/pokok.



Gambar 9. Penanaman *Mucuna brachetea*

Global Telling Pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

Global telling adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi serangan hama pada tanaman kelapa sawit. Global telling dilaksanakan setiap bulan untuk seluruh jenis hama kelapa sawit baik Ulat Daun Kelapa Sawit (UPDKS), tikus, kumbang tanduk (*Oryctes*), rayap, dan hama lainnya pada pohon sampel yang sama dalam global telling perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Unit sampel (US) adalah pohon-pohon yang digunakan sebagai sampel untuk mengetahui tingkat serangan hama pada satuan luas tertentu (Luas 1 US biasanya mewakili areal kurang lebih 1 ha). Pohon-pohon pada US terdiri atas pusat perhitungan (PP) dan pohon sampel (PS).

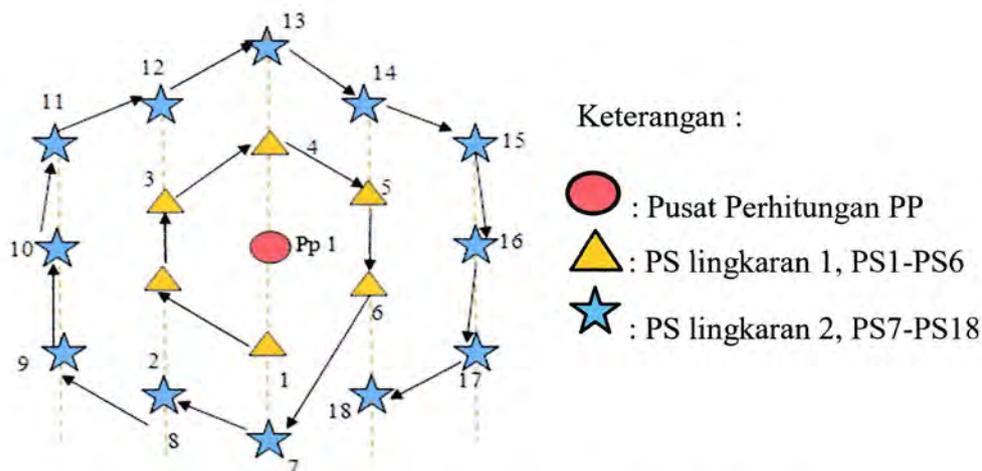
2. Pusat perhitungan (PP) adalah pohon yang digunakan sebagai pusat perhitungan seluas 1 Ha luasan tanaman kelapa sawit, dan pohon sampel (PS) adalah pohon yang mengelilingi PP sebanyak 2 lingkaran. Apabila dalam 1 blok luasannya 25 Ha, maka jumlah PP pada blok tersebut adalah 25



Gambar 9. Penanaman *Mucuna brachyteata*

Global Telling Pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

Global telling adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi serangan hama pada tanaman kelapa sawit. Global telling



Gambar 10. Unit Sampel (US) Pada Global Telling TBM

Cara melakukan global telling yaitu sebagai berikut :

1. Global telling dilakukan pada US (PP dan PS) yang telah ditentukan untuk menentukan tingkat serangan hama ulat pemakan daun kelapa sawit, tikus, kumbang tanduk, dan hama lainnya.
2. Petugas global telling melakukan pengamatan semua serangan hama pada pohon PP dan atau PS.
3. Untuk mengetahui tingkat serangan UPDKS, diambil satu pohon PP atau PS dengan tingkat serangan paling tinggi, apabila serangan rendah maka penentuannya diatur secara bergilir tiap bulan dari PP, PS-1 sampai PS18. Cara menghitung ulat pada pelepah tanaman yang tidak bisa dijangkau dengan tangan adalah dengan memotong pelepah yang ditaksir mempunyai paling banyak ulatnya, apabila serangan rendah maka diambil pelepah ke-25. Pada populasi UPDKS tinggi (>100 ulat / pelepah) perhitungan dibatasi pada sebelah pelepah saja dan hasilnya dikalikan dua. Perhitungan tingkat serangan dihitung

berdasarkan US masing-masing, sehingga dalam satu blok dapat terjadi berbagai tingkat serangan.

Tabel 2. Kriteria Tingkat Serangan Hama Kelapa Sawit Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

Jenis Ulat	Tingkat Serangan (Rata-Rata Per Pelepah)		
	Ringan	Sedang	Berat
Ulat Api	2-5	6-8	>10
Ulat Kantong	2-3	4-8	>8



(a) Simbol PP (Pusat Perhitungan) (b) Simbol PS Lingkaran Ke-1 (PS1-PS6) (c) Simbol PS Lingkaran ke-2 (PS7-PS18)

Gambar 11. Simbol Pada Global Telling

Pengendalian hama ulat api dan ulat kantong yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian Secara Mekanis

Tindakan ini dilakukan dengan cara mengutip kepompong/ulat (*hand picking*) yang terdapat dipiring sela-sela pelepah daun.

2. Pengendalian Secara Kimiawi

Pengendalian ini merupakan tindakan yang praktis dan cepat. Tindakan ini dilakukan bila populasi ulat dari hasil perhitungan khusus telah menunjukkan rata-rata populasi > 2 (dua) per pelepah. Pengendalian dilakukan pada awal pusat serangga dengan menggunakan insektisida kontak.

3.2.6. Pengendalian Gulma TBM Kelapa Sawit

Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada waktu, tempat dan kondisi yang tidak diinginkan oleh manusia. Pertumbuhan gulma pada perkebunan kelapa sawit harus dikendalikan karena gulma menyebabkan adanya persaingan sarana tumbuh dengan tanaman kelapa sawit.

Sarana tumbuh yang diperebutkan meliputi cahaya matahari, unsur hara, air dan ruang. Pengendalian gulma dilakukan untuk mengurangi persaingan sarana tumbuh yang ada.

Pengendalian gulma harus memperhatikan konsep ambang ekonomi dimana kerugian yang ditimbulkan oleh kehadiran gulma tersebut harus lebih besar dari pada biaya yang harus dikeluarkan untuk pengendaliannya.



Gambar 12. Pengendalian Gulma Pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

Kegiatan pengendalian gulma yang dilakukan di Kebun Labuhan Haji Afdeling I yaitu *chemist* piringan. Herbisida yang digunakan dalam pengendalian gulma TBM kelapa sawit adalah herbisida berbahan aktif *fluroksipir MHE*, merk dagang *Starane 480 EC* dengan dosis 80 cc/Ha, rotasi 1x1 bulan dengan norma 1,50 HK/Ha. alat semprot yang digunakan *knapsack sprayer* (KEP SOLO) dengan

kapasitas 15 liter. *Chemist* pada piringan pokok dilaksanakan melingkar dengan jarak 2,5 meter dari pokok. Gulma yang umum ditemukan di piringan Kebun Labuhan Haji Afd I adalah *Eleusine indica* L, *Axonopus compressus*, *Paspalum conjugatum* dan *Mucuna brachteata* yang masuk ke dalam area piringan TBM kelapa sawit dan pasar pikul TBM.

3.2.7. Kastrasi Pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

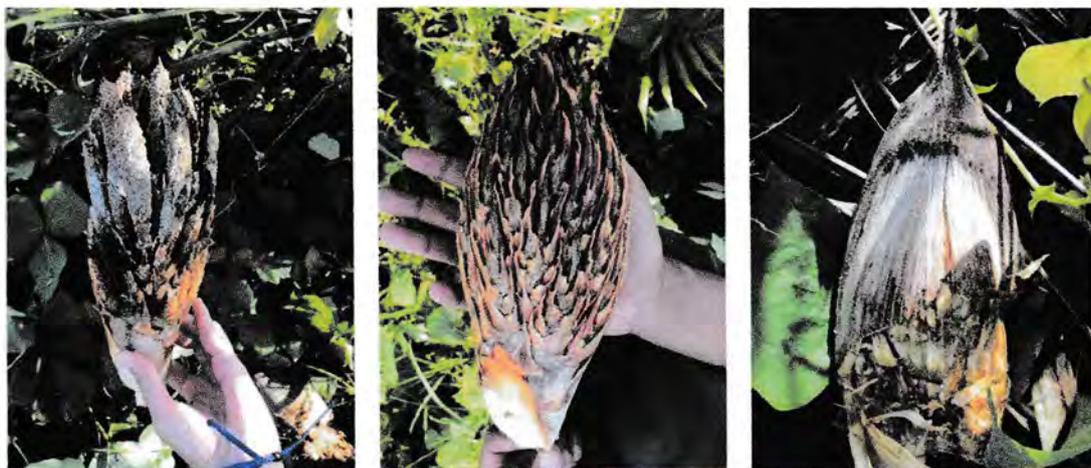
Kastrasi adalah suatu kegiatan membuang bunga pertama tanaman kelapa sawit tujuan untuk menekan pertumbuhan generatif dan merangsang pertumbuhan vegetatif. Pelaksanaan kastrasi disesuaikan berdasarkan jenis bibit yang digunakan. Percobaan ini dilakukan di tanaman belum menghasilkan (TBM) Afdeling I dengan jenis bibit Socfindo.



Gambar 13. Kegiatan Kastrasi

Kastrasi pertama dilaksanakan pada umur 13 bulan sampai 15 bulan dengan rotasi 1 x 1 bulan dengan membuang semua bunga jantan dan bunga betina dan disusun di gawangan mati. Pada umur 16 sampai 17 bulan tidak dilakukan kastrasi gunanya untuk menunggu berkembangnya bunga jantan dan betina. Pada kastrasi kedua dilaksanakan pada umur 18 sampai 20 bulan dengan rotasi 1 x 1 bulan

hanya membuang bunga betina, sedangkan bunga jantan tidak dibuang karena untuk merangsang perkembangan serangga penyerbuk kelapa sawit.



Gambar 14. Bunga Jantan, Bunga Betina dan Buah Dompot

3.2.8. Pengendalian Gulma Pada Tanaman Menghasilkan (TM)

Pengendalian gulma tanaman belum menghasilkan pada kelapa sawit dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu sebagai berikut :

1. Cara Manual

Pengendalian ini dapat dilakukan dengan melihat habitat tanaman keras lalu dibersihkan dengan cara mendongkel atau mencangkul gulma seperti anak kayu dan anak sawit hingga ke akar, namun apabila ada tumbuhan pakis-pakistan cukup dibabat secara manual. Karena tumbuhan yang tumbuh pada areal kebun kelapa sawit seperti pakis-pakistan atau sering disebut dengan epipet tidak menjadi pengganggu pada pertumbuhan pohon kelapa sawit dikarenakan tumbuhan tersebut dapat mencegah hama seperti tikus.

Semua tumbuhan yang berupa kayu dan tukan kelapa sawit didongkel hingga terbongkar akarnya. Hasil dongkelan dijepit pada satu tonggak atau anjang-anjang. Rotasi 4 x 1 tahun, norma prestasi 1 – 1,5 hk/ha.

Pengendalian manual dengan cara memabat seluruh bagian bagian piringan pohon kelapa sawit menggunakan babat. Lalu mendongkel dengan cara mencangkul habibat tanaman keras seperti anak kayu, tanaman bulu-bulu, dan tumbuhan keras lainnya.



Gambar 15. Pendongkelan Anak Kayu

2. Cara Mekanis

Pengendalian gulma dilakukan dengan cara khemis atau semprot gunanya untuk membunuh atau membasmi gulma yang tumbuh disekitar piringan pohon kelapa sawit. Penyemprotan yang dilakukan dengan jarak 2,5 meter, rotasi penyemprotan dilakukan 1 bulan sekali.

Pengendalian ini dilakukan menggunakan Herbisida Sistemik dengan bahan aktif *Isopropil Amina Gifosat* : 480 Gram/Liter dengan merk dagang *Rexroot* dengan dosis 400 CC/Ha dengan norma 0,94 HK/Ha.



Gambar 16. Pengendalian Gulma Dengan Cara Khemis TM

3.2.9. Analisa Daun

1. Penentuan Kesatuan Contoh Daun (KCD)

Kesatuan contoh daun (KCD) atau disebut juga *Leaf Sampling Unit* (LSU) adalah suatu areal yang diambil contoh daunnya untuk mengetahui secara kualitatif pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman.

Prinsip dari satu KCD/LSU adalah keseragaman dalam hal:

- a. Umur tanaman
- b. Jenis tanaman
- c. Tindakan kultur teknis areal
- d. Sekecil mungkin variasi topografi dan drainase.

Luas satu KCD biasanya adalah 20 ha, yang apabila keadaannya seragam maka luas satu KCD dapat diperbesar tetapi tidak melebihi luas 40 ha. Karena akan sukar memberikan dosis pemupukan yang berbeda-beda. Bagi perkebunan maka luas satu KCD lebih kecil dari 5 ha tidak dianjurkan kecuali ada persoalan unsur hara yang sejenis.

2. Penentuan Pohon Contoh

Keperluan jumlah helai daun yang akan dianalisa dibutuhkan dari kira-kira 30 pohon tanaman kelapa sawit untuk satu KCD. Oleh karena itu intensitas dari contoh harus disesuaikan dengan luas dari satu KCD.

3. Jumlah dan Cara Penentuan Pohon

Tabel 3. Komposisi Pohon Contoh Pada Analisa Daun

Luas (Ha)	Jumlah Pohon	Jumlah Pohon Contoh		Cara Penentuan Pohon
		Pohon	%	
5	715	28	4	Setiap 5 pohon selang 5 baris
10	1430	19	2	Setiap 5 pohon selang 10 baris
15	2135	30	1,43	Setiap 5 pohon selang 10 baris
20	2860	28	1	Setiap 10 pohon selang 10 baris
25	3575	29	0,83	Setiap 10 pohon selang 12 baris
30	5290	31	0,59	Setiap 10 pohon selang 15 baris
35	6000	30	0,50	Setiap 16 pohon selang 16 baris

Sumber. Vademikum Budidaya Tanaman Kelapa Sawit PTPN III

4. Syarat-Syarat Pohon Contoh

Pohon-pohon yang akan ditentukan sebagai pohon contoh harus memenuhi berbagai persyaratan, antara lain :

1. Pohon tidak dekat dengan jalan, sungai, bangunan dan parit
2. Tidak merupakan pohon sisipan
3. Tidak berdekatan dengan *hiaten* (areal terbuka)
4. Pohon keadaan normal dan tidak terkena penyakit.

Pohon yang telah ditentukan untuk diambil contoh daunnya diberi tanda dengan jelas dan diberi nomor. Contoh daun dari pohon-pohon tersebut diambil setiap tahun.

7. Cara Pengambilan Contoh Daun

Pengambilan contoh daun dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pelepah yang akan diambil helainya dipotong. Kemudian dari pelepah diambil helai daun pada titik ujung permukaan datar dari permukaan atas pelepah. Helai daun yang diambil adalah 2 (dua) helai pada bagian sebelah kiri dan 2 (dua) helai dari sebelah kanan. Kedua helai daun dari setiap bagian ini, yang diambil adalah satu yang tumbuhnya arah ke atas dan satu tumbuhnya arah ke bawah.
- b. Helai daun yang diambil kemudian dibersihkan dengan kain lap yang di lembabkan.
- c. Sepertiga bagian ujung daun dan sepertiga bagian bawah dibuang dengan memotongnya memakai parang. Bagian helai daun yang diambil adalah sepertiga bagian tengah.
- d. Kemudian lidi helai daun dibuang.
- e. Helai-helai daun dari satu KCD/LSU diikat dan dijadikan satu contoh. Contoh daun ini dimasukkan ke dalam plastik khusus.
- f. Pada setiap kantong plastik yang berisi contoh daun diberi label dengan mencantumkan : nama kebun, no. KCD/LSU, Afdeling, tahun tanaman, luas, tanggal pengambilan.
- g. Daun-daun contoh ini harus dikeringkan pada hari itu juga dengan (*oven*) alat pengering yang mempunyai alat ukur suhu dan sirkulasi udara. Pengeringan dilakukan dengan memanaskan pada temperature 80°C selama 12-15 jam.

- h. Daun-daun yang telah dikeringkan itu dikirim ke Laboratorium (Balai Penelitian) untuk dianalisa.



Gambar 17. Analisa Daun

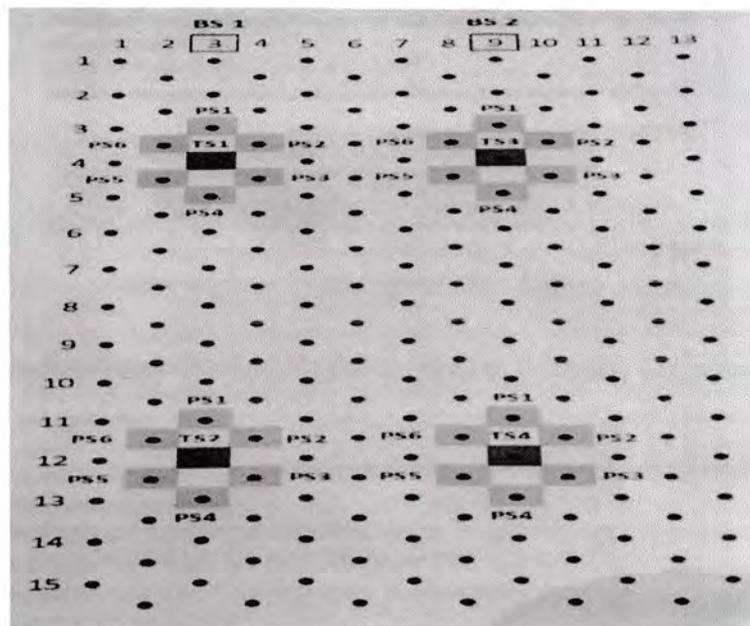
3.2.10. Perhitungan Bunga dan Buah (PBB)

Perhitungan Bunga dan Buah (PBB) bertujuan untuk mengestimasi produksi buah selama 6 bulan. PBB dihitung dua kali setahun yaitu pada minggu ke IV bulan Desember (untuk memprediksi buah pada semester satu) dan pada minggu ke IV bulan Juni (untuk mempredisi produksi buah pada semester dua).



Gambar 18. Perhitungan Bunga Buah

Dalam Perhitungan Bunga Buah (PBB) yaitu dengan melihat baris sampel, titik sampel dan pokok sampel. Baris sampel dilihat dari baris 3 dari ujung/pasar, titik sampel dilihat dari pokok 3 dalam barisan, dan pokok sampel dilihat dari pokok yang berada di sekeliling titik sampel (segi enam). Jarak titik sampel 1 (TS1) ke titik sampel 2 (TS2) yaitu 7 pokok yang dihitung mulai dari PS4 dari TS1 hingga PS1 dari TS2 seperti pada gambar 12.



Gambar 19. Skema dan Pola Dalam Penentuan Baris PBB

Setiap pohon sampel dihitung jumlah bunga betina yang sudah mengalami anthesis dan buah yang berwarna hitam. Pelaksanaan perhitungan bunga dan buah harus dikerjakan untuk dalam waktu 15 hari.

Langkah-langkah dalam menentukan Perhitungan Bunga Buah adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan bunga buah pada kelapa sawit dilaksanakan pada setiap produksi dilakukan 2 x dalam setahun.

2. Penentuan jumlah pohon dalam setiap blok sampel sejumlah 5% diambil secara merata.
3. Pengambilan pohon sampel dimulai dari baris ke 3 pohon ke 3. Setiap 1 titik pohon sample diambil 6 pohon sampel secara melingkar.
4. Perhitungan jumlah bunga buah pohon sampel (PS) tersebut dari ps 1 sampai ps 6 searah jarum jam.
5. Setelah selesai dititik sample 1 kemudian lanjut dititik sampel 2 dengan jarak 5 pohon tanaman kelapa sawit dan begitu seterusnya.
6. Setelah selesai 1 baris lanjut kebaris 2 dengan interval jarak pohon 5 dan begitu seterusnya sampai selesai 1 blok.
7. Kemudian setelah semua data bunga dan buah selesai lalu pindahkan/ditulis di blanko.
8. Dari hasil data tersebut telah diketahui ramalan produksi berdasarkan.

Rumus :

$$\text{Tros} = \frac{\text{Bunga Betina+Buah}}{\text{Jumlah Pokok}}$$

$$\text{Estimasi Produksi} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Pokok} \times \text{RBT}}{\text{Tros}}$$

Percobaan ini dilakukan di tanaman menghasilkan (TM) 2006 Afdeling 1, percobaan ini dilakukan bertujuan untuk meramalkan jumlah produksi yang akan dicapai 6 bulan mendatang dan diprediksi perbulan merencanakan persiapan pemanen, pengangkutan dan pengolahan produksi oleh pabrik. Dalam percobaan ini didapatkan data sebagai berikut :

2. Penentuan jumlah pohon dalam setiap blok sampel sejumlah 5% diambil secara merata.
3. Pengambilan pohon sampel dimulai dari baris ke 3 pohon ke 3. Setiap 1 titik pohon sample diambil 6 pohon sampel secara melingkar.
4. Perhitungan jumlah bunga buah pohon sampel (PS) tersebut dari ps 1 sampai ps 6 searah jarum jam.
5. Setelah selesai dititik sample 1 kemudian lanjut dititik sampel 2 dengan jarak 5 pohon tanaman kelapa sawit dan begitu seterusnya.
6. Setelah selesai 1 baris lanjut kebaris 2 dengan interval jarak pohon 5 dan begitu seterusnya sampai selesai 1 blok.
7. Kemudian setelah semua data bunga dan buah selesai lalu pindahkan/ditulis di blanko.
8. Dari hasil data tersebut telah diketahui ramalan produksi berdasarkan.

Rumus :

$$Tros = \frac{\text{Bunga Betina+Buah}}{\text{Jumlah Pokok}}$$

$$\text{Estimasi Produksi} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Pokok} \times \text{RBT}}{\text{Tros}}$$

Percobaan ini dilakukan di tanaman menghasilkan (TM) 2006 Afdeling 1, percobaan ini dilakukan bertujuan untuk meramalkan jumlah produksi yang akan dicapai 6 bulan mendatang dan diprediksi perbulan merencanakan persiapan pemanen, pengangkutan dan pengolahan produksi oleh pabrik. Dalam percobaan ini didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 5. Analisis Percobaan PBB Semester II Di Afdeling I KLAJI

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Bunga Betina	51 Bunga Betina
2.	Jumlah Buah	299 Buah
3.	Berat Tandan Rata-Rata	20 Kg
4.	Jumlah Pohon Yang Diamati	72 Pohon
5.	Jumlah Pohon seluruhnya	5885 Pohon

Dari data diatas maka di peroleh nilai sebagai berikut :

$$\text{Tros} = \frac{51 \text{ bunga betina} + 299 \text{ buah}}{72} = 4,86 \text{ atau } 5 \text{ Tandan.}$$

$$\text{Estimasi Produksi Semester II 2019} = \frac{5885 \text{ Pohon} \times 20 \text{ kg}}{5} = 23.540 \text{ Kg.}$$

3.2.11. Angka Kerapatan Panen (AKP)

Kegiatan perhitungan AKP termasuk kedalam tahap perencanaan sebelum melakukan panen kelapa sawit. AKP sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat memberikan informasi estimasi produksi kelapa sawit yang dipanen, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan transportasi atau truk pengangkut buah kelapa sawit.

Perhitungan AKP dilakukan dengan mengamati buah yang matang setiap pokok di areal yang akan di panen esok hari. Pengamatan buah matang tidak dilakukan untuk seluruh pokok tetapi hanya 5% pokok sampel dari jumlah pokok dalam satu blok. Setelah didapat jumlah pokok sampel, pengamatan pokok sampel di lapangan biasanya dimulai pada pokok baris ketiga. Dan pengamatan dilakukan dua pasar atau empat baris kelapa sawit dengan interval jarak dari pasar satu ke pasar dua yang tidak ditentukan.

AKP pada tanaman kelapa sawit dilakukan untuk memperkirakan produksi 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan yang akan datang atau 1 hari sebelum panen.

Percobaan dilakukan di Tanaman Menghasilkan (TM) 2006 Afdeling 1 dengan luas lahan 15,68 Ha dengan jumlah pohon 2118 Pokok, tandan yang matang sebanyak 80 tandan, jumlah sampel tanaman sebanyak 166 Pohon, dengan RBT sebesar 20 kg/tandan, kapasitas truk sebesar 8 ton.

a. AKP (Angka Kerapatan Panen)

$$\begin{aligned} \text{AKP} &= \frac{\text{Jumlah Pohon Sampel}}{\text{Jum Tandan Matang}} \\ &= \frac{166}{80} = 2,075 \text{ atau } 2 : 1 \end{aligned}$$

Maka $\text{AKP} = 2 : 1$ artinya dalam 2 pohon dilapangan terdapat 1 tandan buah matang.

b. Estimasi

$$\begin{aligned} \text{Produksi} &= \frac{\text{Jumlah Keseluruhan Pohon} \times \text{RBT}}{\text{AKP}} = \frac{2118 \text{ Pohon} \times 20 \text{ kg}}{2} \\ &= 21.180 \text{ kg.} \end{aligned}$$

c. Kebutuhan Tenaga Kerja

$$\text{Tenaga Kerja} = \frac{\text{Produksi}}{\text{Prestasi Pemanen}} = \frac{21.180}{1.500} = 14,12 \text{ atau } 14 \text{ orang.}$$

d. Kebutuhan Truk

$$\text{Unit Truk} = \frac{\text{Jumlah Produksi}}{\text{Kapasitas Truk}} = \frac{21.180}{8.000} = 2,64 \text{ atau } 3 \text{ truk.}$$



Gambar 20. Pelaksanaan Perhitungan Angka Kerapatan Panen (AKP)

3.2.12. Panen

1. Kriteria Matang Panen

Secara umum tanda yang digunakan untuk mencirikan buah layak panen adalah adanya brondolan luar yang telah lepas dari tandan dan jatuh secara alami dipiringan pohon. Apabila di piringan pohon dijumpai brondolan lima (5) butir secara alami, maka buah tersebut layak panen, dengan kata lain telah memenuhi kriteria matang panen.

Tabel 6. Kriteria Kematangan TBS

Kriteria Matang Panen	Jumlah Brondol Di PKS	Komposisi Panen Ideal
Mentah	Tidak Ada	Tidak Ada
Matang 1	1 – 30 Brondolan	5 %
Matang 2	31 – 70 Brondolan	15 %
Matang 3	71 – 120 Brondolan	40 %
Matang 4	> 120 Brondolan	40 %

2. Rotasi dan Ancak (*Kapveld*) Panen

Rotasi panen adalah lamanya waktu antara panen yang satu dengan panen berikutnya, dalam 1 (satu) ancak panen, rotasi panen erat kaitannya dengan Angka Kerapatan Panen (AKP). Hari panen perlu diatur agar istirahat pabrik tersedia.

Pada semester I (satu), panen dilaksanakan mulai dari hari senin sampai hari rabu terhitung 8 hari kerja dari 10 hari (8/10). Dimana, hari sabtu dan minggu tidak dilakukan pemanenan karena putaran panen semester I hanya merupakan panen trek. Pada semester II (dua), panen dilakukan mulai dari hari senin sampai hari selasa terhitung 8 hari kerja dari 9 hari (8/9). Dimana, hari sabtu melakukan kegiatan panen yang merupakan panen puncak.

Sistem panen yang dipakai adalah sistem panen giring tetap. Pada sistem ini pemanen secara bersama-sama memanen dalam satu (1) blok. Setelah selesai pindah ke blok lain. Satu (1) orang pemanen memanen tiap 2 (dua) baris (satu gawangan), kemudian berpindah kebarisan yang belum dipanen dan seterusnya sampai selesai blok demi blok.

Tabel 7. Peralatan Panen Yang Digunakan Sesuai Umur Tanaman

Umur (Tahun)	TM	Tinggi Batang (m)	Alat Panen
3-4	1-2	< 0,9	Dodos Kecil(8 cm)
5-7	3-5	0,9-2,5	Dodos Besar (14 cm)
>8	>5	>2,5	Egrek

Sumber. Vademikum Bidang Tanamn Kelapa Sawit

Alat-alat yang digunakan untuk kegiatan panen adalah egrek, gagang egrek (fiber), kapak, batu asah, goni, kereta sorong (angkong), dan gancu.

2. Pada TPH

- a. Buah diangkat ke TPH setelah selesai memanen 1 (satu) gawangan atau setelah 2 (dua) jam kerja.
- b. Tangkai tandan dipotong mepet atau berbentuk huruf V (cangkem atau mulut kodok).
- c. Tandan disusun 5 buah/garis dan tegak lurus dengan jala.
- d. Tandan menghadap keatas.
- e. Tandan dan brondolan bebas dari pasir, sampah, tangkai tandan dan kotoran lainnya.
- f. Nomor pemanen dan tanggal panen ditulis pada tangkai tandan.
- g. Brondolan ditumpuk di belakang barisan tandan atau dimasukkan kedalam karung, tidak boleh bercampur dengan tandan.



Gambar 22. Penempatan Buah di TPH

3.2.13. Kap Inspeksi

Kap inspeksi adalah pemeriksaan terhadap seluruh proses panen dengan memberikan nilai kesalahan sesuai norma yang ditetapkan. Kap inspeksi bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan disiplin pelaksanaan panen sesuai norma yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan dalam percobaan ini dilakukan

secara dua tempat pemeriksaan di ancak panen dan pemeriksaan di TPH. Adapun hal-hal yang harus di periksa dari masing-masih tempat dan denda yang dikenakan terhadap pemanen yaitu sebagai berikut :

Tabel 8. Kriteria KAP Inspeksi Tanaman Menghasilkan

<u>Pemeriksaan Di Anciah</u>	<u>Denda</u>	<u>Pemeriksaan Di TPH</u>	<u>Denda</u>
<u>Buah matang tidak dipanen</u>	<u>Rp. 5.000 tandan</u>	<u>Gagang tandan panjang (>25 cm) tidak dipotong</u>	<u>Rp. 2.000 tandan</u>
<u>Buah dipanen tidak diangkut ke TPH</u>	<u>Rp. 25.000 tandan</u>	<u>Gagang tidak dipotong berbentuk "V"</u>	<u>Rp. 500 tandan</u>
<u>Brondolan tidak dikutip</u>	<u>Rp. 50 butir</u>	<u>Tidak menulis nomor (mandor dan pemanen) disetiap pangkal gagang tandan per TPH</u>	<u>Rp. 1.000 TPH</u>
<u>Pelepah tidak disusun</u>	<u>Rp. 1.000 pelepah</u>	<u>TBS busuk (F-5) tidak diberondolkan</u>	<u>Rp. 2.000 tandan</u>
<u>Buah lewat matang tidak dipanen</u>	<u>Rp. 10.000 tandan</u>	<u>TBS tidak disusun di TPH</u>	<u>Rp. 500 tandan</u>
<u>Tidak menurunkan pelepah yang seharusnya diturunkan</u>	<u>Rp. 1.000 Pelepah</u>	<u>Panen buah sangat mentah</u>	<u>Rp. 10.000 tandan</u>

Setiap pemanen yang memanen di areal TM norma, diperiksa setiap hari dan kelas pemanen di tetapkan setiap hari. Setiap pemanen yang memanen di areal tidak produktif (ATP), percepatan panen (TBM3) dan areal rencana TU, diperiksa setiap hari dan jumlah denda yang tidak melaksanakan panen bersih ditetapkan setiap hari jumlah pohon yang diperiksa sebanyak 20 pohon yang dipanen untuk setiap pemanen diancak panen. Pemeriksaan panen dilaksanakan oleh asisten afdeling, mandor 1 dan petugas Kap Inspeksi terhadap ancak/lapangan yang dipanen pada hari itu dan produksi hari itu di TPH. Jumlah pemanen yang diperiksa setiap hari, 10% oleh Asisten afdeling, 20% oleh Mandor 1 dan 70% oleh petugas Kap Inspeksi. Mandor panen mendampingi pelaksanaan Kap Inspeksi dalam pemeriksaan panen setiap hari.

3.2.14. Simulasi Pemadam Kebakaran

Kebakaran merupakan salah satu ancaman yang berbahaya dan dapat menyebabkan korban jiwa jika tidak melakukan upaya yang tepat dalam mencegah kebakaran. Hal inilah yang menjadi dasar dilaksanakan Simulasi Pemadam Kebakaran.

untuk memadamkan api yang kecil dengan cara memukulkannya, dan tandu sebagai alat untuk membawa korban.

Peserta melakukan percobaan dengan cara menarik penyangga yang terdapat pada APAR, kemudian mengarahkan selang ke arah api tanpa melawan arah angin, tekan *handle* untuk mengeluarkan serbuk pemadam api dari nozzle sampai bahan APAR keluar untuk memadamkan api.



Gambar 23. Sosialisai Simulasi Pemadam Kebakaran

3.2.15. Sosialisai Penggunaan Alat Bor (Pocket) Untuk Lubang Pupuk Kelapa Sawit

Teknologi tepat guna ramah lingkungan guna mengatasi masalah drainase kebun dari pengerasan tanah akibat pemupukan kimia (anorganik) serta genangan air (banjir). penggunaan alat bor memiliki manfaat untuk meningkatkan daya respon air, menghindari pupuk berserak di permukaan tanah, mempercepat penguapan zat dan unsur pupuk agar lebih cepat meresap, meningkatkan peran

aktifitas fauna tanah dan akar tanaman serta mengatasi masalah genangan air akibat banjir dan drainase yang buruk.

Adapun bahan dalam pengoboran ini yaitu untuk 1 liter bensin dicampur dengan oli (2T) sebanyak 40 cc dengan perbandingan 1L/40cc. Penggunaan alat bor pupuk dilakukan satu kali dalam satu semester. Semester pertama pengeboran lubang pupuk dilakukan di bagian setengah piringan pada sisi kanan pohon dengan jumlah lubang bor sebanyak 8 lubang, selanjutnya untuk semester kedua dilakukan pengeboran di sisi sebelah kiri dengan lubang bor yang sama.

3.2.16. Drone Areal

Drone areal merupakan kegiatan menggunakan *drone* untuk memberikan informasi secara digital dengan hasil berupa foto. *Drone* dioperasikan menggunakan *software* yang tersambung dengan satelit.

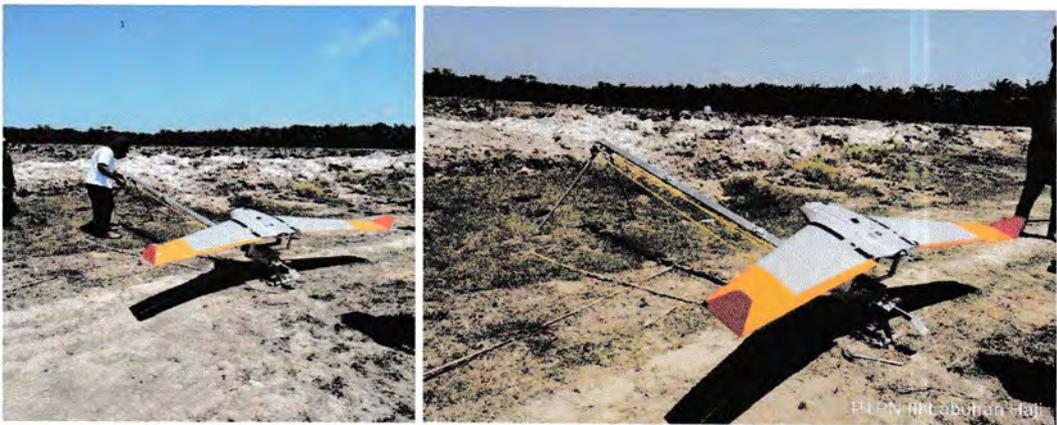
Pengoperasian *drone* dapat menggunakan *remote control* dan *auto pilot mode*. Kegiatan *drone areal* dapat membantu banyak pekerjaan di lapangan. Modal dalam membeli satu *drone* senilai Rp.700.000.000,-

Kegiatan pengoperasian *drone* dapat menekan efisiensi tenaga kerja, biaya dan waktu pekerjaan, seperti perhitungan jumlah pokok dalam suatu areal (inventaris pokok), melihat luasan suatu areal, memberikan informasi kondisi suatu areal seperti keadaan jalan, saluran air (drainase), jembatan dan bentuk fisik lainnya, memberikan informasi bentuk fisik suatu lahan seperti kontur tanah, topografi, kemiringan lereng dan vegetasi lahan.



Gambar 24. Pemasangan *Drone*

Drone dapat terbang selama 45 menit dengan ketinggian 58 km atau lebih dengan jangka penerbangan 700 Ha. *Drone* dapat terbang dengan menggunakan alat bantu yaitu pelontar yang berfungsi untuk membantu *drone* pada saat *take off*. *Drone* dilengkapi dengan kamera beresolusi 24 mp yang akan mengambil foto setiap lima detik sekali. Setiap foto yang diambil dapat mewakili areal seluas 6 ha.



Gambar 25. Penerbangan *Drone*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Labuhan Haji memiliki dua komoditi tanaman perkebunan yang diusahakan yaitu kelapa sawit dan karet dengan luas areal masing- masing yaitu 1.923,23 ha dan 1.179,90 ha.
2. Jadwal kegiatan materi dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah disusun tidak seluruhnya terlaksana, dikarenakan menyesuaikan waktu dan kondisi yang ada di lapangan.
3. Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) mengikuti kegiatan observasi budidaya kelapa sawit baik di TU, Pemancangan, TBM, maupun TM.
4. Kegiatan drone areal menggunakan alat teknologi canggih berupa drone yang dapat membantu menekan efesiensi biaya, tenaga kerja dan waktu pekerjaan di perkebunan.
5. Simulasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dilakukan untuk memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai tanda- tanda bahaya api dan cara pengendaliannya.
6. Sosialilasi Kalibrasi Semprot dan Perhitungan Dosis dilakukan guna memahami ketentuan dan norma penyemprotan yang disesuaikan oleh perusahaan.

4.2. Saran

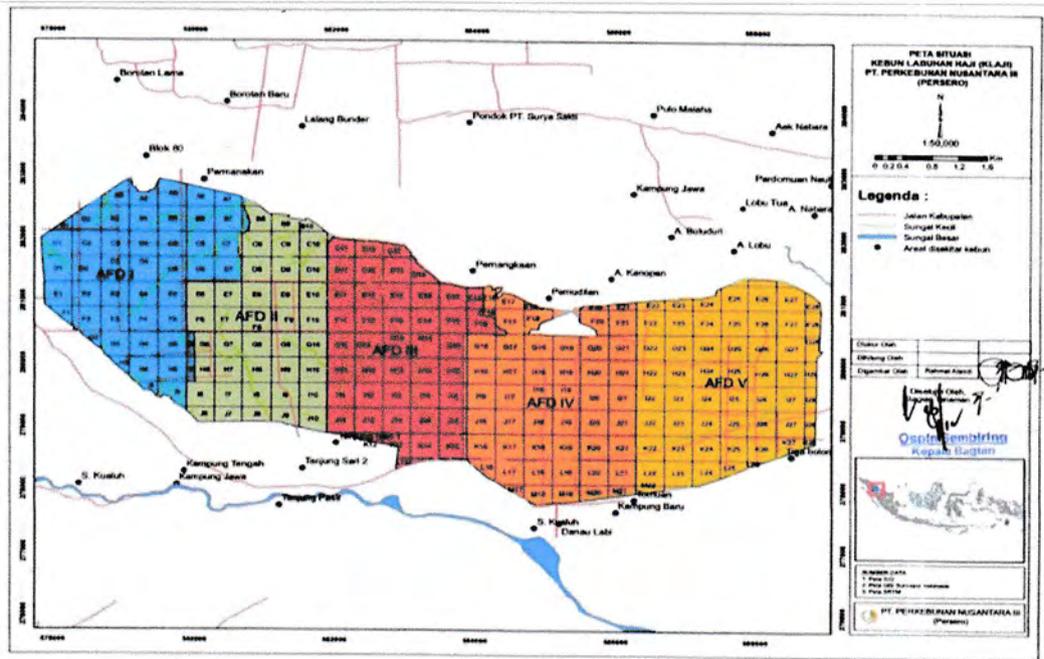
1. Kegiatan praktek kerja lapangan seharusnya dapat diberikan waktu lebih lama lagi, mengingat kegiatan pembudidayaan untuk pengobservasian dua komoditi tanaman perkebunan cukup banyak.
2. Perlunya pemahaman akan pentingnya penggunaan APD dalam bekerja, terkhusus pekerjaan yang berkontak langsung dengan bahan kimia, dan pemanen kelapa sawit.
3. Perlunya kalibrasi pestisida dan teknik aplikasi secara berkala pada setiap pengendalian hama, penyakit maupun gulma tanaman secara khemis.
4. Perlunya pengawasan maksimal dalam upaya melindungi tanaman kebun dari hewan ternak.

DAFTAR PUSTAKA

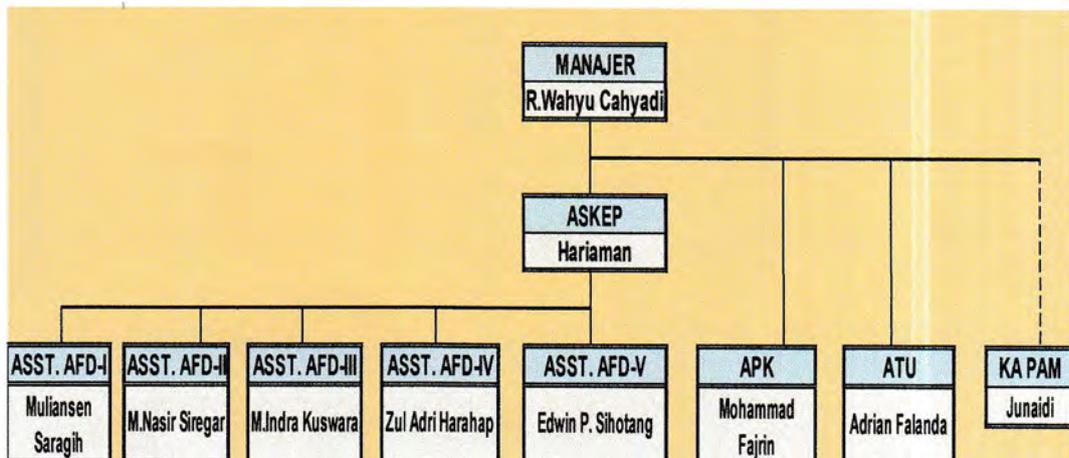
- Data Produksi Perkebunan Kelapa Sawit 2012-2014 <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/839>. diakses pada tanggal 3 Agustus 2019
- Data Luas Perkebunan 2012-2014 Kelapa Sawit. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/1670>. diakses pada tanggal 3 Agustus 2019.
- Faber Tambunan, Susi Royani Hasibuan, Asrita Yohana Siallagan, Enni Ristauli Sianturi. 2010. PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PABRIK KELAPA SAWIT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II KEBUN SAWIT SEBERANG. Program Studi Keteknikan Pertanian Departemen Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
- Kementerian Pertanian. 2015. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Jakarta. KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 2015.
- Pahan,Iyung. 2006. Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Saputra Eko, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2015.
- Sipahutar Ariansyah Eri, Fakultas Pertanian Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara 2014.
- Syakir.M. 2010. Budidaya Kelapa Sawit. Bogor. ASKA MEDIA

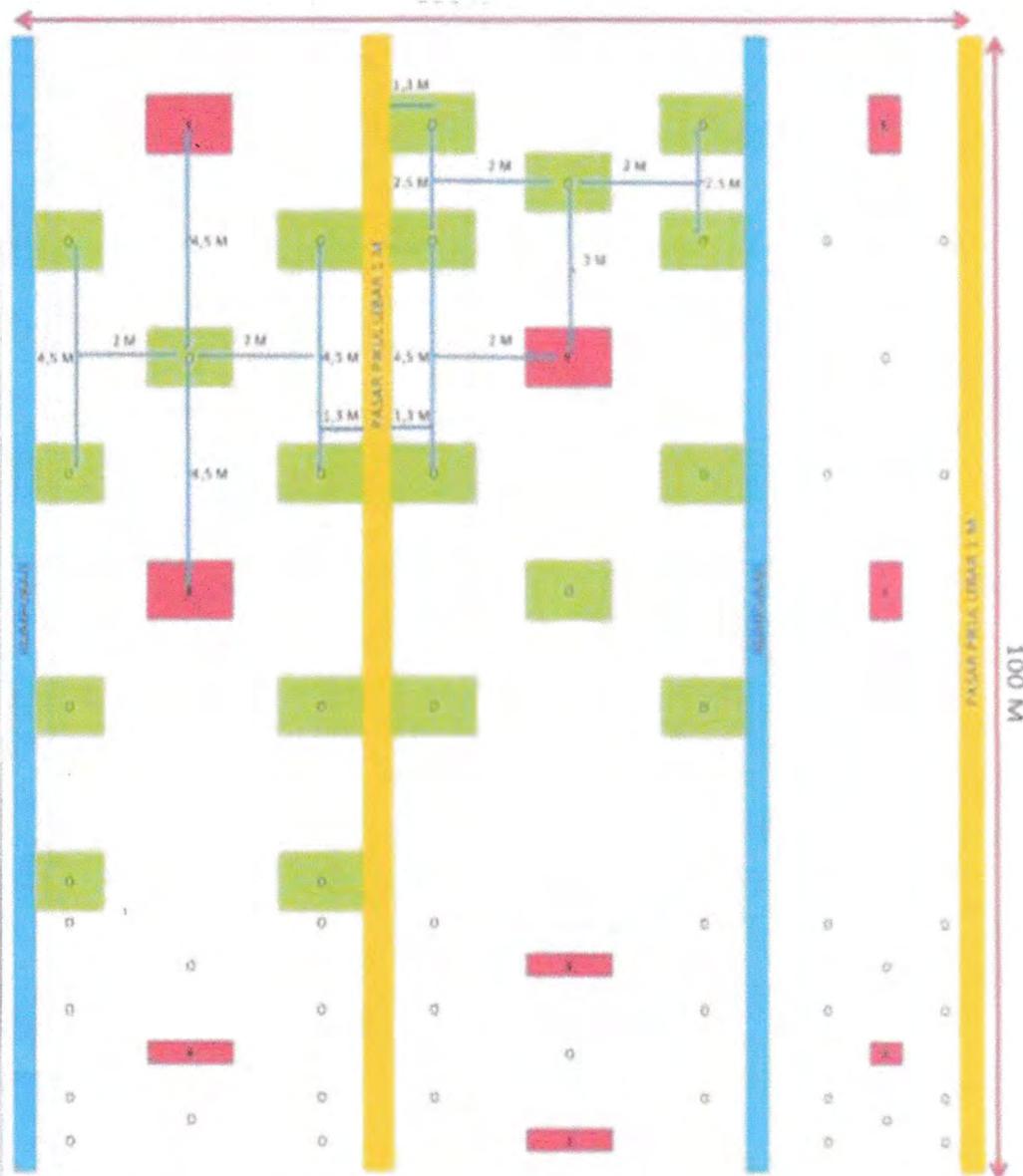
LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Keseluruhan Kebun Labuhan Haji



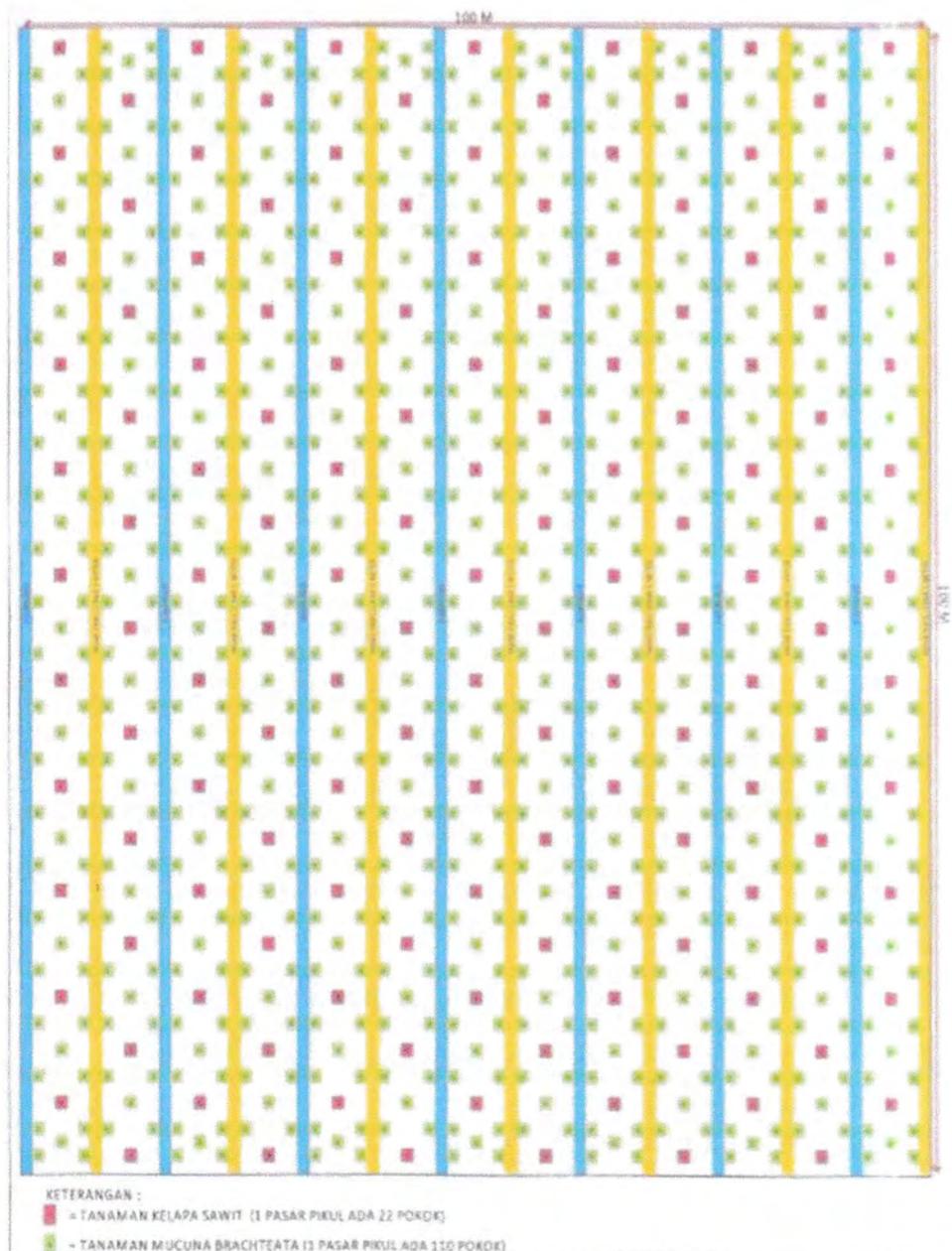
Lampiran 2. Struktur Organisasi Karpim Kebun Labuhan Haji



Lampiran 3. Jarak Tanam *Mucuna brachteata*

KETERANGAN :

- = TANAMAN KELAPA SAWIT
- = TANAMAN MUCUNA BRACHTEATA

Lampiran 4. Pola tanam *Mucuna brachteata*



Perkebunan Nusantara
Labuha Haji, 27 Agustus 2019

Nomor : KLAJI/X/ /2019
Lamp : -
Judul : Laporan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Kepada YTH,
Dekan Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Jalan Kolam Nomor 1

Medan

Sehubungan dengan Surat Kepala Bagian Umum PTPN III (Persero) Nomor :
MU/X/609/2019 tanggal 3 Juli 2019 hal Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL), dengan ini kami
tuhukan bahwa mahasiswa/i dari Fakultas Pertanian Universitas Medan Area telah selesai
aksanakan PKL di PTPN III (Persero) Kebun Labuhan Haji dari mulai tanggal 23 Juli 2019 s/d 23
gustus 2019.

Adapun nama-nama mahasiswa/i dimaksud sebagai berikut :

No	Nama	NPM	Program Studi
1	M. Ghozali	168220005	Agribisnis
2	Aida Nurjannah	168220046	Agribisnis
3	Muhammad Fauzi Nasution	168220087	Agribisnis

Selama PKL nama-nama mahasiswa/i diatas tersebut telah dapat menyelesaikan tugas-
nya dengan baik dan dapat berkerjasama dengan karyawan pimpinan.

Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

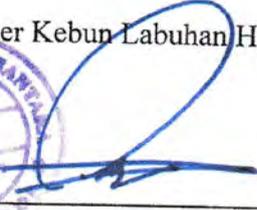
KEBUN LABUHAN HAJI
Manajer Kebun Labuhan Haji

(R. Wahyu Cahyadi)

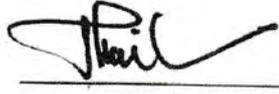


Kriteria	Komponen	Persentase (%)	M. Fauzi Nst		M. Ghozali		Aida Nurjannah	
			Nilai	Total	Nilai	Total	Nilai	Total
Penilaian	Kehadiran/Kedisiplinan	25 %	95	23,75	95	23,75	95	23,75
	Kecakapan Dalam Kegiatan	25 %	95	23,75	90	22,5	95	23,75
	Kerjasama	30 %	90	27	90	27	90	27
	Etika	20 %	90	18	90	18	90	18
Nilai Pembimbing Lapangan			92,5		91,2		92,5	
Nilai Akhir			92,5		91,2		92,5	
Grade			A		A		A	

Mengetahui :

Manajer Kebun Labuhan Haji

(R. Wahyu Cahyadi)

Pembimbing Lapangan


(Hariaman)

Kriteria Nilai :

A \geq 80,00B⁺ = 75,00 – 79,99

B = 70,00 – 74,99

C⁺ = 65,00 – 69,99

C = 50,00 – 64,99



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS PERTANIAN

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20371
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20132
 Website : www.uma.ac.id E-Mail : univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 022/FP.0/01.2/VII/2019

Medan, 5 Juli 2019

Jumlah : 1 (Satu)

Judul : Izin Praktek Kerja Lapangan

Untuk : Manager PT. Perkebunan Nusantara III (Unit Kebun Labuhan Haji)

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat Bagian SDM PT. Perkebunan Nusantara III No. BUMU/X/609/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Izin Praktek Kerja Lapangan maka bersama ini kami mengirimkan mahasiswa peserta PKL ke kebun yang Bapak/Ibu pimpin atas nama :

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi
1	M. Ghozali	168220005	Agribisnis
2	Muhammad Fauzi Nst	168220087	Agribisnis
3	Aida Nurjannah	168220046	Agribisnis

Samping itu perlu kami sampaikan kepada bapak beberapa hal :

- 1. Hasil pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) semata-mata dipergunakan untuk kepentingan Akademik.
- 2. Pelaksanaan PKL berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari efektif kerja mulai 22 Juli 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019.
- 3. Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) terlampir.
- 4. Materi kegiatan PKL menyangkut manajemen budidaya (pembibitan s/d panen), pengolahan hasil dan aktivitas manajemen perkebunan secara keseluruhan.
- 5. Segala pembiayaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan PKL ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- 6. Sehubungan telah diterapkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka bersamaan ini kami harapkan kesediaan bapak untuk mendelegasikan kepada manager kebun untuk menandatangani sertifikat PKL yang akan diterbitkan oleh Fakultas Pertanian UMA.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


 Dr. Ir. Syahbudin, M. Si